



DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



SENTANI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 yang tertuang pada Peraturan Buoati Jayapura tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kesehatan yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yaitu Derajat Kesehatan Meningkat, dengan indikatornya adalah indeks kesehatan dengan capaian kinerja akhir tahun sebesar 73,1 yang didukung beberapa indikator kinerja kunci daerah melalui aspek Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

1. Usia Harapan Hidup mencapai kinerja 67,78 tahun dari target 67,3 tahun di tahun 2023 serta meningkat dari capaian 67,45 tahun di 2022
2. Prevalensi Stunting mencapai kinerja 11,2 % dari target tidak lebih dari 14 % di tahun 2023 serta terjadi perbaikan dari 13,6 % di tahun 2022.
3. Prevalensi Balita Gizi Kurang mencapai kinerja 6 % dengan target tidak melebihi 10 % di tahun 2023.

Dari capaian yang tergambarkan diatas maka kinerja kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan mencapai target daerah di tahun 2023 dan cenderung mengalami perbaikan jika dibanding tahun 2022. Selain itu capaian pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal Kesehatan di tahun 2023 adalah Tuntas Madya dengan predikat yang masih sama dengan tahun 2022.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan ataupun peluang solusi yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan layanan kesehatan perorangan (UKP) melalui Peningkatan mutu layanan Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas serta Sinergisme dan sistem rujukan yang optimal antara FKTP (Puskesmas) dan FKTRL (Rumah Sakit) termasuk penguatan Puskesmas Poned dan RS Ponek dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi sehingga mendukung capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Jayapura.
2. Meningkatkan Gizi balita dan Penanggulangan Stunting dengan Lima Pilar penanggulangan yaitu komitmen pimpinan tinggi, kampanye dan strategi komunikasi, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, penguatan monev.
3. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif melalui pembudayaan Germas, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan aksi Multi Sektoral

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan maksud diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura menyelenggarakan pemerintahan di sector kesehatan. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Bupati Jayapura. Tim penyusun LAKIP berusaha menyusun Laporan akuntabilitas tersebut sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan .

Dalam rangka pertanggungjawaban atau pengelolaan kinerjanya, Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Bupati. Disamping itu penyusunan

LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar hampir di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura dan adanya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan dasar ke daerah terpencil/terisolir secara berkala merupakan gambaran / bukti nyata adanya upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak selamanya dapat menunjukkan hasil yang langsung dirasakan/dimanfaatkan oleh masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat berhasil tidaknya suatu program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya. Kesemuanya itu dapat dituangkan dalam laporan hasil kinerja instansi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas dalam upaya peningkatan Pembangunan dibidang kesehatan secara komprehensif baik yang bersifat Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2023, Dinas Kesehatan melaksanakan program-program prioritas antara lain penanganan stunting, program penurunan kemiskinan ekstrim melalui Penyediaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura dan pelaksanaan eliminasi malaria.

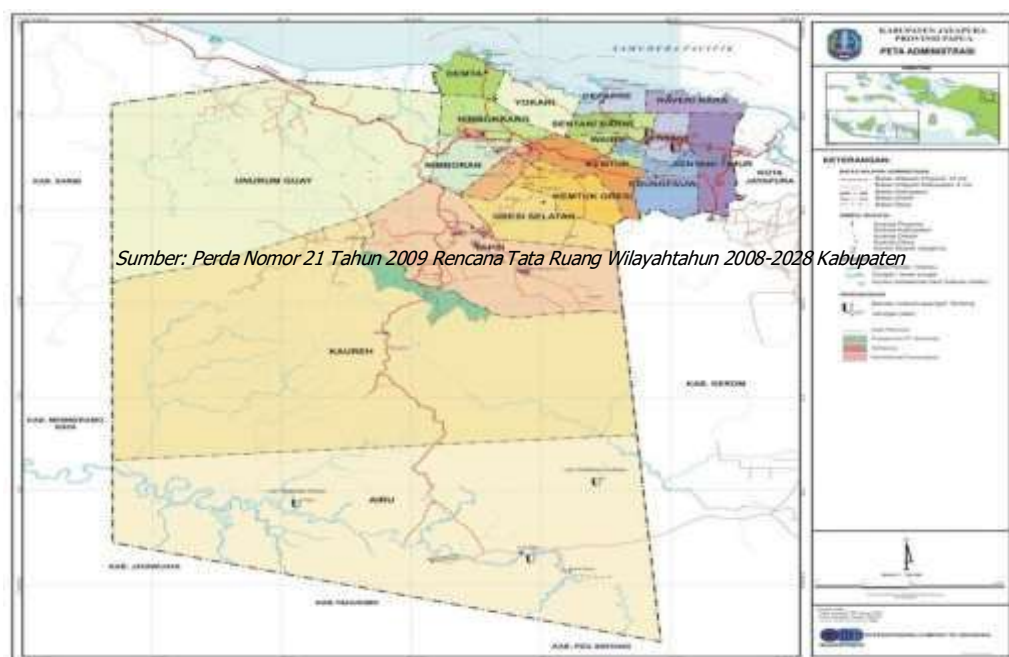
Gambaran Umum

1. Karakteristik Lokasi dan Gambaran Geografis

Berdasarkan tinjauan Astronomi maka Kabupaten Jayapura terletak pada $139^{\circ}44'$ – $140^{\circ}63'$ BT dan $2^{\circ}19'$ LU – $2^{\circ}84'$ LS (penentuan didasarkan titik koordinat pada peta land cover Papua dengan skala 1 : 250.000 tahun 2002).

Kabupaten Jayapura Memiliki luas wilayah sebesar 17,516 km², yang terdiri dari 19 distrik , 5 Kelurahan dan 139 kampung. Kabupaten Jayapura terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Sarmi



4. Kelembaban

Kelembaban udara Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari stasiun meteorologi dan geofisika (stasiun Sentani dan Stasiun Genyem), menunjukkan kelembaban udara di Kabupaten Jayapura tahun 2023 berkisar 65-95.

5. Curah Hujan

Tahun 2021 Curah hujan di Kabupaten Jayapura berfluktuasi Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan curah hujan sebesar 253.4 mm dan terendah pada bulan Desember 57.7 mm. Hari hujan tertinggi di Kabupaten Jayapura pada Bulan Maret 24 hari dan terendah pada bulan Mei 18 hari.

6. Sarana Komunikasi, Transportasi dan Penerangan

Sarana Komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas pada umumnya sudah menggunakan telepon Cellular baik melalui jaringan regular maupun dengan jaringan V-sat. Seluruh Puskesmas yang belum memiliki internet dari TELKOM, telah tersambung V-Sat sehingga seluruh Puskesmas telah memiliki akses komunikasi internet.

Alat transportasi dari Kabupaten ke Distrik sebagian besar lewat darat, 2 Distrik dijangkau lewat laut yakni Distrik Yokari dan Revenirara dan 1 Distrik dijangkau lewat danau yakni Distrik Ebungfauw.

Sarana Penerangan untuk Puskesmas dari 22 Puskesmas yang ada 16 Puskesmas sudah menggunakan listrik dari PLN, namun belum seluruhnya bisa berfungsi 24 jam dan 4 diantaranya menggunakan solar sel 10 KVa yakni; Puskesmas Yokari, Airu, Pagai dan Ravenirara.

1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Dinas Kesehatan pasal 4 ayat 1 dan 2, kedudukan Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura bersama

Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja bertanggungjawab dalam pelaksanaan Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peran strategis ini merupakan bagian integral Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Derajat Kesehatan, karena derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dilaksanakan oleh SKPD lain, seperti pendapat Hendrik L. Blum sebagai berikut :

Gambar 1.2

Teori Derajat Kesehatan Hendrik Blum



Derajat Kesehatan akan meningkat selain karena faktor turunan/herediter yang hanya 5 %, tetapi juga oleh Upaya Kesehatan sebesar 20 % yang merupakan inti pekerjaan Dinas Kesehatan. Faktor terbanyak adalah pada lingkungan dan perilaku masyarakat sebesar 75 %. Oleh sebab itu peran Dinas Kesehatan akan sangat optimal dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat apabila didukung oleh perangkat daerah (PD) lain yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk ikut mewujudkan derajat kesehatan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.

1.2.1 Struktur Organisasi

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, telah menggunakan struktur organisasi yang baru. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diperbaharui sesuai struktur yang ditetapkan.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang antara lain :

1. Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- ii. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
- iv. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum, Program, dan Informasi

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b. Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tugas:

- i. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

- ii. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

- 1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- 2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.

2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes dan peningkatan Mutu

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a. Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b. Seksi Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

6. UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki 3 UPTD yaitu UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten, UPTD Puskesmas dan UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018.

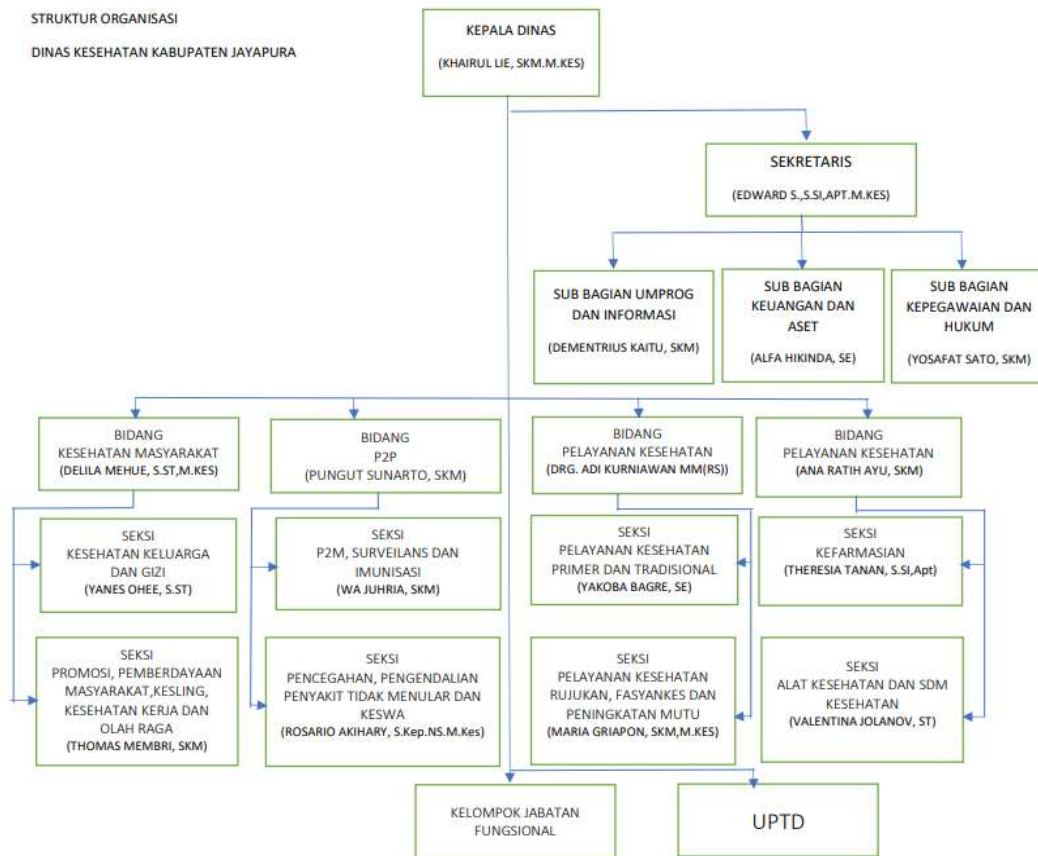
Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain:

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD
- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri dari 5 orang Administrator Kesehatan dan 1 orang Jabatan Fungsional pada program gizi masyarakat dan tersebar di Bidang-Bidang.

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Kab. Jayapura, aspek-aspek tersebut antara lain:

1.2.2 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan tahun 2023 termasuk UPTD baik RSUD Yowari, Puskesmas, Instalasi Farmasi dan PSC 119 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Gambaran Tenaga Medis di Kabupaten Jayapura tahun 2022-2023

No	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan							
					Dokter		Dokter Spesialis		Dokter Gigi		Total Dokter	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Sentani Timur	7	1	11.083	2	2			1	1	3	3
2	Sentani	10	2	85.885	6	7			1	1	7	8
3	Ebungfauw	5	1	3.858	1	1					1	1
4	Sentani Barat	5	1	6.432	1	2				1	1	3
5	Waibu	7	2	23.730	3	5			1	2	4	7
6	Depapre	8	1	5.503	1	1					1	1
7	Ravenirara	4	1	1.668	1	1					1	1
8	Kentuk	12	1	5.148	1	1					1	1
9	Kentuk Gresi	12	1	5.467	1	1					1	1
10	Namblong	9	1	3.988	1	1					1	1
11	Nimboran	14	1	5.409	3	4				1	3	5
12	Nimbokrang	9	1	8.124	2	2					2	2
13	Demta	7	1	4.029	2	2				1	2	3
14	Yokari	5	1	2.844	1	1					1	1
15	Unurum Guay	6	1	3.782	1	2					1	2
16	Kaureh	5	1	12.445	1	2					1	2
17	Gresi Selatan	4	1	1.447	1	1					1	1
18	Yapsi	9	1	7.712	2	2					2	2
19	Airu	6	2	1.670		2					0	2
20	RSUD YOWARI				10	10	19	19			46	47
	Jumlah	144	22	200.224	41	50	19	19	3	7	80	94

Dari data diatas, tenaga medis pada sektor Kesehatan di sarana pemerintah menunjukkan belum tercapai sesuai harapan dimana rasio dokter 46,9/100.000 penduduk, walau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, sedangkan dokter gigi cukup rendah di 3,49/100.000 penduduk.

Tabel 1.2
Gambaran Tenaga Bidan dan Perawat di Kabupaten Jayapura tahun 2022-2023

No	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan			
					Perawat		Bidan	
					2022	2023	2022	2023
1	Sentani Timur	7	1	11.083	15	16	13	13
2	Sentani	10	2	85.885	28	33	23	23
3	Ebungfauw	5	1	3.858	13	23	6	6
4	Sentani Barat	5	1	6.432	11	11	7	9
5	Waibu	7	2	23.730	23	23	15	21
6	Depapre	8	1	5.503	8	9	10	11
7	Ravenirara	4	1	1.668	4	5	4	4
8	Kemtuk	12	1	5.148	12	12	11	11
9	Kemtuk Gresi	12	1	5.467	5	5	8	8
10	Namblong	9	1	3.988	7	7	7	3
11	Nimboran	14	1	5.409	11	13	12	12
12	Nimbokrang	9	1	8.124	7	7	6	5
13	Demta	7	1	4.029	10	13	7	6
14	Yokari	5	1	2.844	6	7	4	3
15	Unurum Guay	6	1	3.782	7	7	6	6
16	Kaureh	5	1	12.445	11	11	4	4
17	Gresi Selatan	4	1	1.447	5	6	4	4
18	Yapsi	9	1	7.712	11	11	13	13
19	Airu	6	2	1.670	12	12	4	4
20	RSUD YOWARI				185	174	65	61
	Jumlah	144	22	200.224	391	405	229	227

Sebagaimana tergambar pada table diatas, Jumlah perawat pada UPTD Puskesmas sebanyak 231 orang dan pada RSUD Yowari sebanyak 174 orang. Sedangkan jumlah tenaga bidan untuk puskesmas 166 dan pada RSUD Yowari berjumlah 61 orang dengan total perawat 405 orang atau dengan rasio 202,2 per 100.000 Penduduk, sedangkan Jumlah total bidan sebanyak 224 atau 113,3 per 100.000 Penduduk.

Tabel 1.3
Gambaran Tenaga Kesmas, Kesling dan Gizi di Kabupaten Jayapura Tahun 2022-2023

No	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan					
					Ahli gizi		Kesehatan Lingkungan		Kesehatan Masyarakat	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Sentani Timur	7	1	11.083	4	4	3	3	1	2
2	Sentani	10	2	85.885	7	7	2	5	3	7
3	Ebungfauw	5	1	3.858	2	2	2	2		1
4	Sentani Barat	5	1	6.432	2	2	2	2		1
5	Waibu	7	2	23.730	2	4	3	4	4	4
6	Depapre	8	1	5.503	2	2	1	1	1	2
7	Ravenirara	4	1	1.668	1	2	2	2	1	2
8	Kemtuk	12	1	5.148	1	1	1	1	2	1
9	Kemtuk Gresi	12	1	5.467	1	2	1	1	1	2
10	Namblong	9	1	3.988	1	1	1	2	2	3
11	Nimboran	14	1	5.409	2	2	3	3	1	1
12	Nimbokrang	9	1	8.124	2	2	1	1	1	2
13	Demta	7	1	4.029	3	3	1	1	2	1
14	Yokari	5	1	2.844	1	2	1	2	0	1
15	Unurum Guay	6	1	3.782	1	1	1	1	1	1
16	Kaureh	5	1	12.445	2	3	1	1	3	3
17	Gresi Selatan	4	1	1.447	1	1	1	1	1	1
18	Yapsi	9	1	7.712	1	2	1	1	1	2
19	Airu	6	2	1.670	1	2	2	2	1	2
20	RSUD YOWARI				13	10	5	5	7	7
	Jumlah	144	22	200.224	50	55	35	41	33	46

Dari gambaran table diatas, untuk tenaga Kesehatan masyarakat baik di UPTD Puskesmas dan RSUD Yowari berjumlah 46 orang atau 22,97/100.000 Penduduk, sedangkan Sanitarian sebanyak 41 orang atau 20,47/100.000 Penduduk dan Nutrisisionis sebanyak 55 orang atau 27,46 /100.000 Penduduk

Tabel 1.4
Gambaran Tenaga Laboran, Teknik Biomedika Lain dan Keteknisian Medis
di Kabupaten Jayapura tahun 2022-2023

No	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan	
					Ahli Laboratorium	
					2022	2023
1	Sentani Timur	7	1	11.083	3	3
2	Sentani	10	2	85.885	6	7
3	Ebungfauw	5	1	3.858	3	3
4	Sentani Barat	5	1	6.432	2	2
5	Waibu	7	2	23.730	5	9
6	Depapre	8	1	5.503	1	2
7	Ravenirara	4	1	1.668	1	1
8	Kemtuk	12	1	5.148	2	2
9	Kemtuk Gresi	12	1	5.467	1	3
10	Namblong	9	1	3.988	1	2
11	Nimboran	14	1	5.409	2	2
12	Nimbokrang	9	1	8.124	3	3
13	Demta	7	1	4.029	2	2
14	Yokari	5	1	2.844	2	2
15	Unurum Guay	6	1	3.782	1	1
16	Kaureh	5	1	12.445	1	1
17	Gresi Selatan	4	1	1.447	1	2
18	Yapsi	9	1	7.712	2	2
19	Airu	6	2	1.670	1	2
20	RSUD YOWARI				18	17
	Jumlah	144	22	200.224	58	68

Dari data diatas, Puskesmas Kabupaten Jayapura memiliki tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 51 tenaga dan di RSUD Yowari 17 tenaga, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 33,96/100.000 penduduk

Tabel 1.5
Gambaran Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Jayapura tahun 2022-2023

No	Distrik	Jumlah Kelurahan/Kampung	Jumlah Puskesmas	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan			
					Tenaga teknis kefarmasian		Apoteker	
					2022	2023	2022	2023
1	Sentani Timur	7	1	11.083	1	2	1	1
2	Sentani	10	2	85.885	3	3	1	2
3	Ebungfauw	5	1	3.858	1	1		1
4	Sentani Barat	5	1	6.432	2	2		1
5	Waibu	7	2	23.730	0	3		2
6	Depapre	8	1	5.503	2	2		1
7	Ravenirara	4	1	1.668	1	1		
8	Kemtuk	12	1	5.148	0		1	1
9	Kemtuk Gresi	12	1	5.467	1	2		
10	Namblong	9	1	3.988	1	1		
11	Nimboran	14	1	5.409	1	1		1
12	Nimbokrang	9	1	8.124	2	2		1
13	Denta	7	1	4.029	1	1	1	1
14	Yokari	5	1	2.844	0	1	1	1
15	Unurum Guay	6	1	3.782	1	2	1	1
16	Kaureh	5	1	12.445	1	2		
17	Gresi Selatan	4	1	1.447	1	1		
18	Yapsi	9	1	7.712	1	1		1
19	Airu	6	2	1.670	1	2		
20	RSUD YOWARI				13	10	5	5
	Jumlah	144	22	200.224	34	40	11	20

Untuk tenaga Kefarmasian, Kabupaten Jayapura memiliki tenaga teknis Farmasi atau Asisten Apoteker sebanyak 40 orang dan Apoteker sebanyak 20 orang pada tahun 2023.

Tabel 1.6
Gambaran Tenaga Manajemen dan Struktural di Kabupaten Jayapura tahun 2023

NO	UNIT KERJA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HARAPAN			0			0		1	1	0	1	1
2	SENTANI			0			0	1	1	2	1	1	2
3	EBUNGFAUW			0			0			0	0	0	0
4	DOSAY			0			0			0	0	0	0
5	DEPAPRE			0			0	1		1	1	0	1
6	RAVENIRARA			0			0			0	0	0	0
7	KANDA			0			0			0	0	0	0
8	KEMTUK												
9	SAWOY			0			0			0	0	0	0
10	NAMBLONG			0			0			0	0	0	0
11	GENYEM			0			0			0	0	0	0
12	NIMBOKRANG			0			0	1		1	1	0	1
13	DEMTA			0			0			0	0	0	0
14	YOKARI			0			0	3		3	3	0	3
15	UNURUM GUAY			0			0			0	0	0	0
16	TAJA			0			0			0	0	0	0
17	SADUYAP			0			0			0	0	0	0
18	LEREH			0			0			0	0	0	0
19	AIRU			0			0			0	0	0	0
20	PAGAI			0			0			0	0	0	0
1	RS Yowari			14			4			11	0	0	0
	dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta dan termasuk pula Rumah Bersalin)			0			0			0	0	0	0
				0			0			0	0	0	0
				0			0			0	0	0	0
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0			0	0	0	0
	INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0			0	0	0	0
	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			17			5			5	0	0	0
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^a			31			9			24	0	0	64
											0	0	

Pelayanan kesehatan, membutuhkan tenaga pendukung seperti tenaga manajemen guna membantu tugas dan fungsi keuangan di UPTD Puskesmas. Tahun 2023, melalui tenaga kontrak, terdapat 6 tenaga manajemen akuntansi yang tersebar di Puskesmas Sentani, Puskesmas harapan, Puskesmas Genyem, dan 5 orang tenaga manajemen pada dinas kesehatan.

Pegawai struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Pegawai Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terdiri dari 17 Jabatan eselonisasi dengan 1 eselon II, 5 eselon III dan 11 Jabatan eselon IV, dengan total OAP pada jabatan tersebut sebanyak 6 orang dan 11 orang adalah Non OAP. seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
Gambaran Jabatan Struktural di Kabupaten Jayapura
berdasarkan OAP dan Non OAP Tahun 2023

NO	URAIAN	SUKU			JUMLAH
		PAPUA	PAPUA NON JAYAPURA	NON PAPUA	
1	ESELON I				
2	ESELON II			1	1
3	ESELON III	1		4	5
4	ESELON IV	5		6	11
TOTAL					

1.2.3 Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan aspek terpenting dalam pembangunan manusia yang berkualitas yang dimulai sejak janin dalam kandungan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang standar pelayanan Minimal serta Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan Permenkes N0.4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus berbenah meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya baik dari segi akses pelayanan kesehatan maupun dari segi kualitas layanan. Kabupaten Jayapura memiliki Satu Rumah sakit tipe C yaitu Rumah sakit Umum daerah Yowari serta satu rumah sakit tingkat 4 AU Silas Papare. Terdapat 22 Puskesmas yang berada di wilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan 6 Puskesmas Rawat Inap dan 16 Puskesmas Rawat Jalan dengan status 20 Puskesmas sudah terakreditasi dan 2 Puskesmas akan di akreditasi pada tahun 2024 , sedangkan jaringan penunjang pelayanan kesehatan lainnya terdapat 70 Puskesmas Pembantu dan 19 Polindes , 28 unit puskesmas keliling roda 4 dan 4 unit pusling air serta disetiap puskesmas di sediakan juga pusling roda dua. Kabupaten Jayapura juga memiliki satu UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo yang telah terkoneksi dengan

NCC 119 Kementerian Kesehatan guna memberikan layanan pre- hospital kepada masyarakat dengan memiliki 3 armada ambulance serta satu kantor layanan.

Sumber daya tenaga kesehatan juga terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya dengan melakukan rekrutmen tenaga kontrak yang didistribusi diseluruh wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten jayapura dan dilakukan penigkatankapasitassumber daya dengan adanya pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan tingkat pendidikan pada jenjang pendidikan kesehatn yang lebih tinggi. Indikator derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari tingginya umur harapan hidup seseorang, angka kematian bayi dan angka kematian ibu maternal serta menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada anak balita. Sesuai Indikator RPD Kabupaten Jayapura 2023 – 2026 maka indikator derajat kesehatan masyarakat untuk indeks kesehatan diharapkan dapat mencapai usia 73,2 pada tahun 2023, Prosentase SPM Kesehatan sebesar 100 % atau Tuntas Paripurna.

Dinas Kesehatan kabupaten jayapura memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sarana fasilitas layanan kesehatan antara lain 1 Rumah Sakit, 22 Puskesmas, 70 Puskesmas Pembantu dan 19 Polindes. Disamping itu terdapat sarana kesehatan swasta yang turut membantu layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.8
Gambaran Sarana Kesehatan di kabupaten Jayapura tahun 2023

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			1	1			2
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			6				6
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			45				45
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			15				15
3	PUSKESMAS KELILING			29				29
4	PUSKESMAS PEMBANTU/polindes			88				88
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN						6	6
2	KLINIK PRATAMA				2		7	9
3	KLINIK UTAMA				0			-
4	BALAI PENGOBATAN						5	5
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN							-
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN			1				1
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN							-
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL							-
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT							-
11	UNIT TRANSFUSI DARAH			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL							-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							-
6	APOTEK							-
7	APOTEK PRB							-
8	TOKO OBAT							-
9	TOKO ALKES							-

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, UPTD Puskesmas didukung sarana, prasarana dan alat kesehatan. Puskesmas Airu, Ravenirara, dan Waibhu yang memiliki Prosentase Sarana terendah, namun sudah diintervensi pada tahun anggaran 2022 dan sedang updating data, sedangkan untuk prasarana terendah adalah ravenirara dan waibhu sedangkan untuk alat kesehatan pada puskesmas waibhu. Puskesmas Waibhu terendah karena menjadi puskesmas baru dan sedang proses penguatan. Hal tersebut terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.10

**Prosentase Sarana, Prasarana dan Alkes UPTD Puskesmas Tahun 2023
(Aplikasi ASPAK)**

No.	Nama Puskesmas			Lokasi	Kelengkapan		
					Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan
1	UNURUM GUAY	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,81
2	WAIBHU	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	83,11
3	NIMBOKRANG	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
4	HARAPAN	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
5	NAMBLONG	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,75
6	EBUNGFAUW	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
7	GENYEM	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,6
8	SENTANI KOTA	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	98,59
9	SADUYAP	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,78
10	KANDA	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
11	SAWOY	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,78
12	DOSAY	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,82
13	KEMTUK	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
14	REVENIRARA	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,68
15	YAPSI	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
16	DEPAPRE	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
17	AIRU	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
18	YOKARI	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,78
19	LEREH	Ranap	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	98,76
20	DEMTA	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	99,83
21	PAGAI	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	100
22	KHOMBA WALIYAUW	-	Kemkes	Kab. Jayapura	100	100	0

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Isu Strategis Internasional

Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik, 62 sasaran dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015. Untuk Sektor Kesehatan yang menjadi isu strategis adalah pada poin **no.3** yaitu **Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia.**

Melalui isu ini, Indonesia menetapkan prioritas target SDG's melalui Tim Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 17 *Goal*, 169 target dan 240 indikator. Untuk sektor kesehatan berada pada pilar pembangunan sosial yaitu dengan 4 goal 19 target dan 31 indikator. 4 Goal yang dimaksud antara lain :

1. Gizi Masyarakat dengan 8 target
2. Sistem Kesehatan nasional dengan 13 target
3. Akses Kesehatan Reproduksi dan KB dengan 9 target
4. Sanitasi dan Air bersih dengan 8 target.

Beberapa indikator dan terget yang perlu diperhatikan dalam menunjang pencapaian SDGs Indonesia 2030 adalah :

- Tahun 2025 menurunkan angka stunting dan wasting pada balita
- mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH
- mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH;
- mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya;
- mengurangi 1/3 kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental;
- memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan;
- mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas;
- menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi;
- Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang;
- mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah.

Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024.

Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan antara lain :

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi Mencakup:
 1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
 2. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
 3. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
 4. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda

Mencakup:

1. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;

3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 4. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
 5. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
 6. Penguatan sistem surveilans gizi;
 7. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
 8. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
- c. Peningkatan pengendalian penyakit Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut.

Mencakup:

1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
2. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera
4. Pengendalian resistensi antimikroba;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

- d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Mencakup:
1. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 2. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
 3. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 4. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
 5. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan
- e. Penguatan Sistem Kesehatan
1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
 3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan
 4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
 5. Penguatan pelaksanaan JKN

Isu Pembangunan Provinsi Papua

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yakni “Papua Sehat yang Berkeadilan” maka harus didukung dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat, selaras dan konsisten dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan kemandirian yang berkeadilan
Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui Pelayanan Kesehatan bergerak kaki telanjang.
2. Intervensi berbasis/ pendekatan wilayah (berbasis kewilayahan)
Keragaman etnis dan budaya serta karakteristik wilayah mengharuskan program pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan berbasis wilayah, sehingga intervensi pelayanan di 5 wilayah adat
3. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care)
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional
Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui peningkatan disiplin, kinerja dan kapasitas aparatur serta penerapan SAKIP secara konsisten.

Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2041

RIPP TAHUN 2041 memiliki isu kesehatan dalam mencapai Papua Sehat terdiri dari :

- i. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan perbaikan gizi masyarakat
- ii. Mempercepat pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Papua
- iii. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- iv. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
- v. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan
- vi. Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan
- vii. Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- viii. Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan

Isu Pembangunan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayapura dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
- 2. Akses dan pelayanan kesehatan.**
3. Daya saing tenaga kerja.
4. Peran masyarakat adat dalam pembangunan.
5. Peran kampung adat dalam pembangunan.
6. Ekonomi kerakyatan.
7. Infrastruktur wilayah dan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan.
8. Layanan komunikasi dan informasi.
9. Kesejahteraan Sosial.
10. Perumahan Layak huni.
11. Air bersih dan sanitasi.
- 12. Tata kelolala pemerintahan.**
13. Penataan pemukiman.
14. Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
15. Gender dan perlindungan anak.
16. Lingkungan hidup.

Dalam hal peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, Kabupaten Jayapura terus memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke kampung-kampung melalui penguatan infrastruktur kesehatan maupun pendekatan layanan kesehatan melalui mobile klinik, Posyandu-posyandu dan layanan puskesmas keliling.

Kabupaten Jayapura memiliki kampong-kampung yang masih terisolir karena ketiadaan akses infrastruktur baik jalan maupun dermaga seperti kampong Muara Pasra, dan Kampung Umbron di Distrik Kaureh; Kampung Nandalsi di Distrik Unurum Guay, Kampung Omon di Distrik Gresi Selatan serta beberapa kampong di Distrik Airu. Keterbatasan sarana kesehatan di kampong-kampung dengan prosentase 72.2 % dari 144 kampong yang sudah memiliki sarana dan petugas kesehatan menjadikan 27.8 % Kampung belum memiliki akses

terhadap pelayanan kesehatan dengan baik. Pendekatan program kesehatan oleh Puskesmas terhadap kampung-kampung tersebut telah dilakukan melalui puskesmas keliling dan posyandu secara rutin.

Selain itu, keterbatasan dan pemerataan petugas kesehatan di sarana-sarana kesehatan belum maksimal. Sarana Puskesmas yang belum memiliki standard 9 jenis profesi tenaga kesehatan sesuai permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas serta ketersediaan tenaga-tenaga perawat dan bidan di Puskesmas Pembantu menjadi salah satu isu penguatan akses pelayanan kesehatan di kampung.

Penguatan pembangunan kesehatan kedepan wajib memperkuat akses pelayanan kesehatan secara terstruktur sambil tetap mendekatkan pelayanan secara program pelayanan melalui Puskesmas Keliling, Posyandu dan Mobile Klinik

1.4 Permasalahan Utama

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPD Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang kewenangan di Kabupaten Jayapura dapat diidentifikasi pada sub bagian berikut ini.

Masalah Pokok.

Dari analisis masalah terhadap berbagai sector pembangunan, dari sector kesehatan dapat disimpulkan masalah pokoknya yaitu belum optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan oleh karena beberapa hal yaitu :

- i. Masih terbatasnya tenaga para medis dan tenaga dokter spesialis.

- ii. Keterbatasan sarana transportasi dalam mendukung pelayanan Kesehatan di daerah terpencil.
- iii. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
- iv. Belum optimalnya pemenuhan gizi sesuai standar untuk pencegahan stunting.
- v. Meningkatnya penderita diabetes, hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya.
- vi. Meningkatnya orang dengan gangguan kejiwaan.

Dalam analisis lebih rinci, dapat ditemukan beberapa masalah pokok tambahan dari sektor kesehatan yaitu :

- a. Disparitas Kualitas Lingkungan hidup di beberapa wilayah
- b. Tingginya Penyakit menular endemis
- c. Pandemi Covid-19 Sejak tahun 2020

Masalah Urusan Wajib Dasar

Dari sector Kesehatan dapat dianalisis beberapa hal yaitu :

- a. Angka harapan hidup Tahun 2020 mencapai 67.05 tahun, telah melewati angka harapan hidup Provinsi Papua tahun 2019, yakni 65.79 tahun, namun masih jauh dari capaian ideal yakni 85 tahun.
- b. Masalah penyakit infeksi belum dapat diatasi namun masalah baru sudah harus segera mendapat perhatian, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner dan sebagainya) yang frekuensinya semakin bertambah, menimbulkan beban ganda dan berimplikasi pada perencanaan di bidang kesehatan.
- c. Penyakit HIV/AIDS pada tingkat yang mengkhawatirkan yang memberi dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan.
- d. Sarana/fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk menjangkau luasnya wilayah serta kesulitan geografis. Sampai akhir tahun 2022 tersedia dua rumah sakit umum milik pemerintah dan TNI, 21 Puskesmas, 69 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes, 5 Pusling Air dan 26 kendaraan Pusling Darat dengan rincian 19 kendaraan baik dan 7 kendaraan rusak sedang-berat, dan memiliki 3 kendaraan PSC 119 serta 1 kendaraan

ambulance jenazah yang dikelola Distrik Demta. Rasio posyandu/balita 1:48; rasio dokter PNS terhadap penduduk 1:167,5; rasio puskesmas terhadap wilayah 1:1 distrik.

- e. Sarana Prasarana dan Alat kesehatan pada beberapa bidang layanan di Rumah Sakit Umum Daerah masih sangat terbatas.
- f. Masih Terbatasnya Tenaga Dokter Spesialis di RSUD dan Puskesmas mampu PONE
- g. Sebanyak 30.6 % dari 144 Kampung/Kelurahan belum mempunyai tempat pembuangan akhir tinja hanya menggunakan kolam/sawah, sungai, lubang tanah, dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Sekitar 45.32 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.
- h. Tenaga kesehatan belum merata terdistribusi sampai ke tingkat kampung.
- i. Masih minimnya fasilitas penunjang pelayanan posyandu di beberapa kampung.
- j. Belum meratanya sarana prasarana dan alat kesehatan kesehatan di setiap kampung.
- k. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas 24 jam di wilayah-wilayah yang jangkauan terbilang cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- l. Masih adanya kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.
- m. Masih tingginya kasus kematian bayi umur 0 sampai kurang dari 1 tahun.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, adalah :

1. Akses Layanan Kesehatan oleh Masyarakat belum optimal yaitu pada angka 78 % dari total 144 Kampung/Kelurahan
2. Keterbatasan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pada Puskesmas Kriteria Pedesaan dan Sangat terpencil serta distribusi SDM Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan belum merata.
3. Peralatan Puskesmas masih terbatas dalam melakukan layanan-layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Unit Gawat Darurat, dan Upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 4 Puskesmas terbatas dan belum mencapai standard menurut Permenkes No. 43 tahun 2019

5. Tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang prima semakin tinggi
6. Beban ganda pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.
7. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020

Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas telah ada diseluruh Distrik di Kabupaten Jayapura
2. Petunjuk Teknis penggunaan dana Kapitasi JKN pada FKTP mendukung pemenuhan sarana dan prasarana FKTP/Puskesmas yang disesuaikan dengan anggaran yang diterima
3. Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan melalui penyediaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberbagai jenjang Pemerintahan
4. Anggaran Dana Desa/Kampung dapat mendukung pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya (Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan umum atas capaian kinerja, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. IKU 2023
3. Matriks Rencana Strategis 2023-2026
4. Penghargaan yang diterima tahun 2023
5. Inovasi Daerah tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

2.1 Perencanaan Strategi

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia yang Maju, Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 9 misi untuk mewujudkannya yang meliputi:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia**
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Pegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan membreikan Rasa Aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 Arahannya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Arahannya tersebut adalah :

1) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua UU pemberdayaan UMKM

4) Penyederhaan Birokrasi

Mempriritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambahtinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 berada pada strategi 1 yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial dengan target tahun 2024 adalah 183/100.000 kelahiran hidup angka kematian Ibu.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Isu strategis Meningkatkan Kualitas manusia antara lain dijelaskan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Kinerja Tahun-				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2022	2023	2024	2025		
1	M.1. Meningkatkan kualitas manusia	T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72.10	72.11	72.12	72.13	72.14	Dinas Pendidikan, Perustakaan, Kesehatan, KB, Perindag, Koperasi, Pariwisata, TPH, Perkebunan dan Peternakan, kelautan dan Perikanan
			S.1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan							Dinas Pendidikan; Perpustakaan
			S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	Dinas Kesehatan
			S.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita							Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan; Setda (Bagian Ekonomi)
2	M.7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	7.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	CC=50,33	CC=50,33	B	B	B	BB	OPD Pelayanan Publik
			S 7.3: Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan		100	100	100	100	100	OPD Pelayanan Publik

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Sektor Kesehatan Memiliki Satu Tujuan yaitu meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing tenaga kerja dengan sasaran pembangunan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan 30 Indikator Kinerja selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan sehingga hasil Indikator tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang meningkat.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui



beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, reasonable, time-bond (SMART-C)*.

Dalam mewujudkan sasaran RPD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna mendukung tercapainya harapan RPD antara lain:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan Kualitas Manusia yang tinggi

Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23		Dinas Kesehatan
			S1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	78	80	82	85	87	90	90		Dinas Kesehatan
			S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	66,9	67,0	67,3	67,7	67,9	68	68		Dinas Kesehatan
			S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan
			S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	81	83	85	87	89	91	91		Dinas Kesehatan
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	32	15	14	13	12	11	11		Dinas Kesehatan
			S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	95	97	98	99	100	100	100		Dinas Kesehatan
			S7 : Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	72	100	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan



Tujuan 7 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 Sasaran 3 RPD Kab Jayapura : Terpenuhi standar pelayanan umum

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		T2: Terpenuhi standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
			S1. Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	C	C	B	B	B	B	B	Dinas Kesehtan	
			S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehtan	
			S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	82	85	87	89	91	93	93	Dinas Kesehtan	

Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan Strategi sector Kesehatan pada RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026 adalah pada strategi ke-2 yaitu **Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan..**

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit

malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tubercolosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS serta pengelolaan potensi obat asli.

Selain itu, Strategi yang dilakukan pada sektor Kesehatan yaitu pada Strategi ke-9 adalah **Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat pelayanan.**

Ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik yang memuaskan telah semakin tinggi dan berkonsekuensi pada diperlukannya perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara terus menerus. Perbaikan tatakelola terkait dengan penerapan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan secara internal birokrasi maupun dalam interkoneksinya dengan masyarakat sipil dan dunia usaha. Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah pembaharuan dan perubahan mendasar secara terus menerus terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek-aspek yang terkait dengan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Dalam konteks Kabupaten Jayapura, substansi perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi ini selain terkait dengan eksistensi perangkat daerah pada level kabupaten juga terkait dengan eksistensi distrik yang secara geografis yang memiliki rentang kendali yang terhambat kondisi geografis dalam efektivitas pelayanannya. Konteks spesifik lain terkait kehadiran pemerintah daerah/birokrasi adalah pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) dalam masyarakat serta penanganan gangguan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak.

Distrik sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan memiliki posisi strategis dalam mensinergikan kekuatan pelayanan pada level perangkat daerah dengan potensi keberdayaan masyarakat pada level kampung dan kampung adat. Dengan posisi strategis itu distrik diposisikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelatihan SDM dan pusat data/informasi pembangunan. Melalui penguatan distrik, perangkat daerah menempatkan aparatnya di setiap distrik, sementara itu warga kampung dan kampung adat datang ke pusat distrik untuk belajar dan mendapatkan pelayanan dari PD baik melalui UPTD maupun melalui aparat PD yang ditugaskan di distrik. Dengan strategi ini PD dominan beroperasi pada level distrik sementara pemerintahan kampung dan kampung adat beroperasi melalui RPJMK, RKPK dan APBK.

Strategi Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester I tahun 2020 telah membawa dampak pada segala aspek, baik sosial maupun ekonomi. Selama tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan



dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2026 sektor Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan dengan strategi :

- 1) Penerapan Protokol Kesehatan melalui 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
- 2) Pengoptimalan pelaksanaan vaksinasi serta meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment).
- 3) Optimalisasi fungsi dan peran Kampung Tangguh Kabupaten Jayapura.

Penerapan strategi tersebut diharapkan menjadikan kondisi Pandemi Covid-19 akan segera berubah menjadi endemi, sehingga walaupun Covid-19 masih ada namun dengan frekuensi dan jumlah kasus yang rendah. Dengan berubahnya Covid-19 menjadi penyakit endemi, strategi yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan upaya promotif preventif terhadap penyakit menular dengan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan.
2. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Jayapura dengan mempertimbangan kapasitas penanganan wabah melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.
3. Peningkatan cakupan vaksinasi dan ketersediaan obat serta bahan habis pakai dalam penanganan Covid-19 melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.

Arah Kebijakan

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berbeda setiap tahun bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada PD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Berdasarkan pemahaman demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura selama periode 2023-2026 dari sektor kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kab Jayapura 2023-2026

Strategi dan Arah Kebijakan R1 D-Ras Jayapura 2023-2026							
TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas manusia yang tinggi							
1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata	1. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar	√	√	√	√
	2.	Peningkatan ketahanan kesehatan keluarga	2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat	√	√	√	√
			3. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar khusus OAP	√	√	√	√

Dalam mencapai arah kebijakan RPD Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026 maka diperlukan Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, sehingga arah pembangunan kesehatan dapat terukur dan terfokus guna Jayapura sehat yang mendukung Papua sehat dapat tercapai. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Misi 1 : Meningkatkan kualitas manusia							
Misi 7 : Menwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Peningkatan Akses pelayanan Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Kampung	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Puskesmas
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan
				Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi petugas kesehatan di Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				Penyediaan Prasana dan Alat Kesehatan Puskesmas dan jaringannya	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Prasana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Penyediaan Logistik Kesehatan untuk Puskesmas dan Jaringannya secara merata	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat dan Vaksin
							Pengadaan Bahan Habis Pakai
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pemenuhan Operasional Puskesmas dan jaringannya agar dapat menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pemeliharaan seluruh sarana, Prasana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan
							Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
				Penyediaan Pelayanan Kesehatan berjalan ke wilayah sangat terpencil dan terisolir	PROGRAM PEMENUHAN URUPA KES EHTAN PER ORANGAN DAN URUPA KES EHTAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus



No	Tujuan	Besaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pemenuhan pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Melaksanakan upaya pencegahan penyakit melalui surveilans dan kewaspadaan dini wabah serta imunisasi yang merata di seluruh wilayah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
							Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah
				Menyediakan layanan kesehatan yang bermutu melalui puskesmas yang terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penggunaan sediaan farmasi		Mengawasi pelaksanaan fasilitas kesehatan penyedia sediaan farmasi dan alat kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)
		Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk makanan dan minuman		Pengendalian dan peningkatan peran serta pengelola Tempat Pengelolaan Makanan, jasa boga, rumah makan serta depot air minum dalam menyediakan produk yang sehat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk mandiri rumah tangga		Pengendalian dan peningkatan peran serta pengelola industri rumah tangga dalam menyediakan produk yang sehat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minuman Pada Produksi Rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Asas Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan upaya pelayanan dalam meningkatkan kemandirian kesehatan di masyarakat	Melaksanakan upaya-upaya promosi kesehatan di masyarakat dengan berbagai media	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Penguatan kesehatan lingkungan untuk Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan
				Menginventarisir dan mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal di masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional/Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat melalui UKM		Menyelenggarakan UKM yang terpadu dan efektif berbasis masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
				Menyelenggarakan gerakan masyarakat hidup sehat untuk meningkatkan indeks keluarga sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Meningkatkan Pemasaran sumber daya Kesehatan	Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kualitasnya	Penyediaan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
				Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Penguasaan SDM Kesehatan
				Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya agar sesuai standar layanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten/kota
		Tewujudnya perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Gizi Masyarakat	Mencegah dan menangani stunting di masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Tewujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat		Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk perlindungan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Memastikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi balita sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat usia produktif sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat usia lanjut sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Mellitus sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Gangguan Jiwa Berat sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gangguan Jiwa Berat
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Tuberkulosis sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gangguan Tuberkulosis
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Infeksi HIV sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gangguan Risiko Terinfeksi HIV



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tepenuhnya standar pelayanan umum	Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan di bidang kesehatan	PROGRAM PEMBIKHAH UPAWA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAWA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
				optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Pemenuhan layanan administrasi perkantoran dengan efisien	Melaksanakan fungsi manajemen perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RWA-SKPD
							Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Nilitas Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				menyediakan sarana dan prasarana keaja yang memenuhi standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				menyediakan Logistik dan peralatan kerja sesuai standar dalam pelayanan administrasi perkantoran		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Pengkengkapan kantor
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU
				Memperkuat pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berjenjang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Facilitasi Kunjungan Tamu
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Pemenuhan layanan administrasi keuangan dengan efisien dan akuntabel	Melaksanakan fungsi manajemen keuangan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
			Mengendalikan pengelolaan Ast daerah sesuai standar	Melaksanakan manajemen pengelolaan barang milik daerah dengan efisien dan transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
							Pemulangan Pegawai yang Pensiun dalam Melaksanakan Tugas
				meningkatkan Prestasi Kinerja ASN melalui SKP Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Meningkatkan kompetensi Pejabat struktural pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penguatan pelaksanaannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Batu, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan. Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2022

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Terdiri dari : Indeks Fertilitas, Indeks Morbiditas dan Indeks Mortalitas	73,2	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Angka Morbiditas, Fertilitas dan data Mortalitas di masyarakat
			$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$			
		Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	68 Tahun	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	data angka kematian bayi, angka kematian Ibu, Angka Kematian Kasar, Angka Kelangsungan Hidup Bayi
		Rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Rata-Rata Prosentase Capaian 12 Indikator SPM Kesehatan per target yaitu 100 %	100%	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, dan Sekretariat	Dokumen Profil Kesehatan untuk data SPM Kesehatan

Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati. Perjanjian kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Dinas Kesehatan.



1. Eselon II

Dalam penetapan Perjanjian Kinerja Eselon II, disepakati indikator kinerja antara Penjabat Bupati Jayapura dan Eselon II sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Saluan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	73	Disusun berdasarkan DPA TA2023 (sebelum Perubahan)	Disusun, berdasarkan DPA TA 2023 (setelah Perubahan)
2	Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	Prosen	100		
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp 174.074.556.793

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja eselon II tersebut, disepakati pembiayaan antara lain :

Program	Anggaran Rp	Sumber Dana (APBD;APBN)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.434.870.673	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	87.365.064.934	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.779.811.280	APBD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	289.100.000	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.205.709.906	APBD



2. Eselon III

Dalam penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III, disepakati indikator kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Kepala Bidang sebagaimana tabel dibawah ini :

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pada bidang ini, disepakati perjanjian kinerja sebanyak 2 indikator yang termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan(TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	Persen	82	TW1 =79 TW2=79 TW3=85 TW4=85
		Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	Persen	80	TW 1 =88 TW2=90 TW3=95 TW4=98

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pada bidang ini, disepakati perjanjian kinerja sebanyak 4 indikator pada dua program yang termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan(TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang Berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,3	TW 1 =67,3 TW2=67,3 TW3=67,3 TW4=67,7
		Terwujudnya perbaikan BZK masyarakat	Prosentase Stunting	Persen	<14	TW 1 =<13 TW2=<13 TW3=<13 TW4=<13
		Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capien SPM Kesehatan	Persen	100	TW1=30 TW2=60 TW3=90 TW4= 100

**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	Prosen	100	TW1=30 TW2=60 TW3=90 TW4= 100

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pada bidang ini, disepakati perjanjian kinerja sebanyak 2 indikator pada pelaksanaan dua program yang termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	Persen	82	TW1=0 TW2=60 TW3=70 TW4 = 82

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Prosen	85	TW1=85 TW2=85 TW3=85 TW4=85

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada bidang ini, disepakati perjanjian kinerja sebanyak 1 indikator pada pelaksanaan satu program yang termuat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan(TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosenwe Capaian SPM Kesehatan	Prosen	100	TW1=30 TW2=60 TW3=90 TW4= 100

Sekretariat Dinas

Pada bidang ini, disepakati perjanjian kinerja sebanyak 4 indikator pada pelaksanaan dua program yang termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon II (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	Huruf	B	TW1=0 TW2=0 TW3=0 TW4=B

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis EselonII	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan Indikator	Target	
					2023	Rencana Aksi Target per Tri Wulan(TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	Huruf	B	TW1=0 TW2=0 TW3=0 TW4=B
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase basil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	TW1=100 TW2=100 TW3=100 TW4=100
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	Persen	89	TW1=30 TW2=60 TW3=70 TW4=89

3. Eselon IV

Dalam perjanjian Kinerja Eselon IV, ditetapkan indikator berdasarkan indikator output sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung indikator Eselon III dan Eselon II sebagaimana terlampir rinci dalam Laporan LAKIP ini. Pada tabel dibawah ini, ditetapkan jumlah indikator perjanjian kinerja per pejabat Eselon IV

Tabel 2.14
Jumlah Indikator Perjanjian Kinerja Eselon IV

No	Nama Jabatan Eselon IV	Jumlah Indikator	Target
1	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	4 indikator	100 %
2	Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga	6 indikator	100 %
3	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4 Indikator	100 %
5	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi	5 indikator	100 %
6	Kepala Seksi Kefarmasian	1 indikator	100 %
7	Kepala Seksi Alat Kesehatan dan SDM	3 indikator	100 %
8	Kepala Sub Bagian Umum, Program dan Informasi	5 indikator	100 %
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset	4 indikator	100 %
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Hukum	1 indikator	100 %
11	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Kesehatan Tradisional	4 indikator	100 %
12	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes Dan Peningkatan Mutu	3 indikator	100 %

Jika dirangkum seluruh indikator perjanjian kinerja maka dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.13
Indikator Kinerja Kunci dan SPM Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kab Jayapura tahun 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Angka usia harapan hidup	66,4	66,9	67,3	67,7	67,9	68	68
2	Prosentase stunting	32	31	30	29	28	27	27
4	Prevalensi balita gizi kurang	18,1	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
1	Prosentase balita gizi buruk men dapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	29,5	23	21	19	17	15	15
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	34,8	30	28	26	24	22	22
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	29,5	23	21	19	17	15	15
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	197	150	130	120	100	90	90
6	Prosentase Distrik memiliki satu Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	85,71	87	90	92	95	97	97
8	Prosentase komplikasi Neonatal yang ditangani	46,2	50	60	70	80	90	90
9	Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani	76,9	80	82	85	87	90	90
10	Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	111,1	100	100	100	100	100	100
11	Prosentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,56	85	85	85	90	95	95
11	Prosentase balita pneumonia yang ditangani	33,5	50	60	70	80	90	90
12	Prosentase orang terduga TBC yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79	100	100	100	100	100	100
13	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
14	Penderita diare yang ditangani	85,71	87	89	92	94	98	98
15	Angka Insidens Malaria per 1000 Penduduk	192	20,3	10,2	6,1	2	1	1
16	Prosentase penderita HIV men dapat layanan kesehatan sesuai standar	95,6	100	100	100	100	100	100
17	Prosentase Bayi men dapat layanan kesehatan sesuai standar (Cakupan kunjungan bayi)	61,9	85	92	95	97	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Prosentase Ibu Hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan kunjungan Ibu hamil K4)	76,7	100	100	100	100	100	100
19	Prosentase Ibu Nifas mendapat layanan kesehatan sesuai standard	109	100	100	100	100	100	100
20	Prosentase Bayi Usia 0-28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan KN3)	101,8	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	46,2	56	57	58	59	60	60
22	Prosentase Balita mendapat layanan kesehatan sesuai standard	59	100	100	100	100	100	100
23	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	77,7	100	100	100	100	100	100
24	Prosentase pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	100
25	Prosentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
26	Prosentase Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	53,3	100	100	100	100	100	100
27	Prosentase Lansia (orang berusia 60 tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	96,41	100	100	100	100	100	100
28	Prosentase penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,1	100	100	100	100	100	100
29	Prosentase penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,3	100	100	100	100	100	100
30	Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	87,9	100	100	100	100	100	100
31	Prosentase Kampung Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	31,9	35	37	39	42	45	45

Dari tabel diatas, total indikator kinerja yang masuk dalam perjanjian kinerja ada 31 indikator dan akan dilaksanakan dalam mendukung tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Pengukuran capaian kinerja pada LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ini dilakukan dengan menilai pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga diketahui berapa sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dan berapa sasaran yang tidak memenuhi target, bahkan berapa sasaran yang tidak ada pencapaian sama sekali.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Dalam rangka mendapatkan pencapaian target sasaran indikator kinerja dikonversikan dengan satuan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja juga dilakukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan menilai Indikator Input, Proses, Output dan Outcome. Rincian pengukuran dilakukan menggunakan form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dikonversikan dengan indikator kinerja kegiatan tersebut kedalam satuan yang dapat diukur seperti, Dana, SDM, Laporan, paket dan lain sebagainya. Sehingga terdapat beberapa tahapan dalam kerangka pengukuran kinerja yaitu :

1. Penyusunan Rencana Strategik
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Penetapan Kinerja atas rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
4. Pengukuran kinerja yang mencakup :
 - a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
 - b. Pengukuran tingkat Pencapaian Kinerja Tahunan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya,

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Baik	
2	75,1 – 90,0	Tinggi	
3	65,1 – 75,0	Sedang	
4	50,1 – 65,0	Rendah	
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	

3.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026

Pada dasarnya penetapan urusan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan penetapan kewenangan wajib dan SPM bidang kesehatan, adalah :

- Terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan.
- Terlindungnya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin kelompok rentan, dan daerah miskin.
- Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan.



Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah Kabupaten dan daerah Kota wajib menyelenggarakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah, serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI. Urusan Wajib ditetapkan untuk melindungi hak-hak konstitusional perorangan/ masyarakat, melindungi kepentingan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum.

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 2023-2026

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan guna mendukung sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan dokumen rencana strategis dinas kesehatan kabupaten Jayapura tahun 2023-2026 yang mempedomani rencana pembangunan daerah Kabupaten Jayapura 2023-2026 sebagai dasar kinerja maka dapat digambarkan capaian indikator sasaran dan tujuan yaitu :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan Kualitas Manusia yang tinggi

Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Dinas Kesehatan			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Akhir 2023	
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		Target	Capaian
		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73.20	73.21
			S1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	82	80
			S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	67,3	67,7
			S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100	82
			S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	85	100
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	14	12,5
			S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	98	97
			S7 : Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	100	82,2



Tujuan 7 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 Sasaran 3 RPD Kab Jayapura : Terpenuhi standar pelayanan umum

No	Tujuan/Sasaran Dinas Kesehatan			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja akhir 2023	
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		Target	Capaian
		T2: Terpenuhi standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	100	100
			S1. Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	B	CC
			S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	100	100
			S3. Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	87	87

Dari gambaran capaian pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan bahwa secara umum dapat tercapai kinerjanya, namun perlu memperhatikan pada indikator sasaran peningkatan kemandirian masyarakat dan pelaksanaan SPM Kesehatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan, terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura antara lain Indeks Kesehatan, serta indeks pemenuhan SPM Kesehatan. Capaian di tahun 2022 dan 2023 antara lain :

- Indeks Kesehatan pada tahun 2023 belum terdapat hasil dari BPS Kesehatan namun pada tahun 2022 telah tercapai 73,0 dari target 73,2
- Indeks Pemenuhan SPM Kesehatan mencapai predikat Tuntas Madya pada tahun 2023 yang sama juga hasilnya di tahun 2022 dengan target Tuntas Paripurna.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Capaian indikator Kinerja bidang Kesehatan yang didalamnya terkandung indicator SPM Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini, dengan gambaran bahwa seluruh indikator kinerja kunci dapat dilaksanakan menjadi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023.



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023
(IKK dan SPM Kesehatan)

NAMA INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2022	Target 2023	Capaian per 31 Desember 2023		% Kinerja 2023 (8= capaian Kinerja/ Target)	Analisis Kinerja
				Absolut	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7		9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Angka usia harapan hidup	Tahun	67,45	67,3		67,78	100,71	
Prosentase stunting	%	13,6	30	856	11,23	100,00	
Prevalensi balita gizi kurang	Orang	4,5	<10	457	6,00	100,00	
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	4	100,00	100	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	4,8	21	63	19,90	100	
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	5,1	28	70	23,62	100	
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Orang	4,2	21	57	19,23	100	
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	192	130	11	202,42	64,22	
Prosentasi Distrik memiliki satu Puskesmas	%	100	100	22	100,00	100	
Prosentase Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	%	22,73	90	8	36,36	40,40	
Prosentase komplikasi Neonatal yang ditangani	%	11	57	118	4,61	8,09	
Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani	%		82	466	21,45	26,16	
Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	100	100	2902	99,44	99,44	
Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	85,4	85	135	93,75	100	
Prosentase balita pnemonia yang ditangani	%	100	60	2266	100	100,00	
Prosentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	100	6349	103,78	100,00	
Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	64	100,00	100	
Penderita diare yang ditangani	%	100	89	4037	74,62	83,84	
Angka Insidens Malaria per 1000 Penduduk	Orang	368	10,2	29.630	147,97	6,89	
Prosentase penderita HIV mendapat layanan kesehatan sesuai standard	%	96	100	11985	86,07	86,07	



NAMA INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2022	Target 2023	Capaian per 31 Desember 2023		% Kinerja 2023	Analisis Kinerja
				Absolut	Capaian Kinerja		
Prosentase Bayi mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan kunjungan bayi)	%	100	92	4087	81,64	88,74	
Prosentase Ibu Hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan kunjungan ibu hamil K4)	%	85,7	100	2241	82,63	82,63	
Prosentase Ibu Nifas mendapat layanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	2838	109,74	109,74	
Prosentase Bayi Usia 0 - 28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan KN3)	%	100	100	2809	109,81	109,81	
Prosentase Balita mendapat layanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	11518	91,71	91,71	
Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	41,9	100	4544	54,74	54,74	
Prosentase pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	1	100,00	100,00	
Prosentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	13	100,00	100,00	
Prosentasi Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	91	100	77455	88,65	88,65	
Prosentase Lansia (orang berusia 60 tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	68	100	8544	51,58	51,58	
Prosentasi penderita Hipertensi usia >=15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	2117	70,43	70,43	
Prosentase penderita Diabetes Mellitus usia>=15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	1541	76,82	76,82	
Prosentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	%	100	100	224	31,46	31,46	
Prosentase Kampung Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	%	45	37	81	56,25	152,03	



Pada tabel diatas dapat dijelaskan hasil kinerja Kesehatan berdasarkan nilai target daerah yaitu:

1. **Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik** adalah sebanyak 19 indikator atau 54,29 %.
2. **Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi** adalah sebanyak 5 indikator atau 14,29 % dari total indicator.
3. **Indikator yang mendapat penilaian sedang** adalah sebanyak 1 indikator atau 2,86 % dari total 35 indikator.
4. **Indikator yang mendapat penilaian rendah** adalah sebanyak 3 indikator atau 8,57 % dari total 35 indikator.
5. **Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah** adalah 5 Indikator atau 14,2 % dari total 35 indikator

Pencapaian SPM Kesehatan tahun 2023

SPM bidang kesehatan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang pelaksanaan SPM Kesehatan mengandung prinsip sebagai berikut :

- Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan dan menyeluruh, terarah dan terpadu sesuai Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Nusantara Sehat.
- Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esential dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat (positive Health Externality).



- Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya.
- Bersifat dinamis.
- Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Dalam pelaksanaan SPM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 telah terlaksana seluruh kegiatan guna menunjang tercapainya kinerja yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.4

Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023

NO	NAMA INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2022	Target 2023	Capaian per 31 Desember 2023		% Kinerja 2023 (8= capaian Kinerja/ Target)	Analisis Kinerja
					Absolut	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7		9
1	Prosentase Ibu Hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan kunjungan ibu hamil K4)	%	85,7	100	2241	82,63	82,63	
2	Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	100	100	2902	99,44	99,44	
3	Prosentase Bayi Usia 0 - 28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan KN3)	%	100	100	2809	109,81	109,81	
4	Prosentase Balita mendapat layanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	11518	91,71	91,71	
5	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	41,9	100	4544	54,74	54,74	
6	Prosentasi Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	91	100	77455	88,65	88,65	
7	Prosentase Lansia (orang berusia 60 tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	%	68	100	8544	51,58	51,58	
8	Prosentasi penderita Hipertensi usia >=15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	2117	70,43	70,43	
9	Prosentase penderita Diabetes Mellitus usia>=15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stndard	%	100	100	1541	76,82	76,82	
10	Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	%	100	100	224	31,46	31,46	
11	Prosentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	100	6349	103,78	100,00	
12	Prosentase penderita HIV mendapat layanan kesehatan sesuai standard	%	96	100	11985	86,07	86,07	

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan



dengan target kinerja untuk seluruh indikator (12 Indikator) adalah 100 % maka terdapat dua indikator yaitu Prosentase Bayi Usia 0 - 28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan KN3) dan Prosentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Dari data diatas, ditemukan bahwa 33,3 % dari indikator SPM Kesehatan telah mencapai Kinerja Tinggi sedangkan Indikator lainnya belum mencapai hasil yang memuaskan. Pencapaian terendah pada indikator Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard. Dalam penilaian nasional dengan capaian total SPM Kesehatan adalah 82,2 % maka masuk dalam predikat **Tuntas Madya** (e-spm.bangda.kemendagri).

Analisis Permasalahan

Kendala dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten jayapura antara lain:

1. Secara umum, 12 SPM Kesehatan dilaksanakan kepada masyarakat walaupun belum mencapai 100 % untuk seluruh indikator atau TUNTAS MADYA yaitu 82,2 %, namun beberapa indikator mengalami peningkatan dari terget dengan kinerja tinggi dan sangat baik atau diatas 75,1 %
2. Beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target atau zona kuning dan merah yaitu pelayanan kesehatan bagi usia pendidikan dasar dan Pelayanan Kesehatan bagi usia lanjut dan pelayanan kesehatan bagi ODGJ. Hal ini terjadi akibat belum terintegrasinya layanan kesehatan primer seperti Posbindu dan poslansia dengan Puskesmas Pembantu sehingga pelaksanaan penemuan, penanganan dan manajemen program belum tertata baik.
3. Kemandirian Masyarakat masih kurang dalam membangun kesehatan diri dan keluarga dibuktikan juga dengan rasio posyandu per balita di masyarakat adalah 1:48 orang yang seharusnya 1:20 balita.
4. 80 % dari 144 Kampung/kelurahan di Kabupaten jayapura sudah memiliki sarana kesehatan sehingga masih ada 15-20 % kampung belum memiliki akses ke sarana kesehatan, dengan catatan bahwa tidak semua kampung harus memiliki sarana kesehatan karena jarak yang berdekatan dengan sarana kesehatan di kampong lainnya.



5. Dari 22 Puskesmas di Kabupaten Jayapura, 8 Puskesmas yang sudah memiliki standar SDM Kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019 yaitu minimal sembilan jenis tenaga kesehatan. Sedangkan 14 Puskesmas lainnya belum sesuai standar dengan rata-rata pada ketiadaan dokter gigi dan Apoteker.
6. Pembiayaan SPM Kesehatan belum maksimal oleh karena Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengelola anggaran yang didominasi sumber anggaran DAK, DAU Spesifik Grand dan OTSUS yang telah diatur menggunakan Petunjuk Teknis sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tahun 2023, postur anggaran DAK/OTSUS mencapai 73 % (Diluar Belanja Gaji PNS) walaupun ada peningkatan pada sumber anggaran DAU/DID/DBH oleh karena refocussing anggaran, namun petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut pada penanganan covid-19. Akibatnya juga pada manajemen pelaksanaan SPM Kesehatan.
7. Pengawasan secara berjenjang belum optimal dilaksanakan juga dalam rangka pelaksanaan manajemen data melalui sistem informasi secara online.

Solusi

Dalam menghadapi kendala di atas beberapa solusi dapat diambil yaitu:

1. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK serta pelaksanaan integrasi layanan primer
3. Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
4. Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan.
5. Penguatan logistik Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan



SPM Kesehatan.

6. Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
7. Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan

Tindak Lanjut

Dalam mereduksi permasalahan dan memperkuat solusi yang diambil, maka tidak lanjut jangka pendek adalah perhitungan pembiayaan/costing SPM yang lebih efisien dan efektif dalam penetapan anggaran, penguatan pelaksanaan PIS-PK sebagai data dasar kesehatan dan melibatkan lintas sektor, membangun pengawasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan layanan kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Selain itu dengan adanya sensus penduduk 2020 maka jumlah penduduk sebagai target pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi masalah dalam pelaksanaan manajemen penerapan SPM Kesehatan

3.1.2 Pencapaian Target Tahun 2023 dengan target Nasional

Dalam pelaksanaan program kesehatan, terdapat target-target Nasional dan Provinsi Papua yang menjadi target utama sebagaimana telah disampaikan pada Bab II dengan penjelasan sebagaimana termuat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 3.5
Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Jayapura Tahun 2023	Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi Papua	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Angka Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu sebesar <202,42/100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi sebesar <19,9/1000 Kelahiran Hidup	Target Capaian AKI tahun 2023 adalah 200/100.000 KH sedangkan AKB sebesar 20/1000 KH	Target Capaian AKI Nasional 2024 adalah 183/100.000 KH sedangkan AKB adalah 24/1000 KH
2.	Stunting	Capaian indikator Stunting pada tahun 2022 adalah 11,2 %	Target Capaian Stunting tahun 2023 adalah 23 %	Target Capaian Stunting pada tahun 2024 adalah 14 %.
3	Imunisasi Dasar Lengkap	Capakain Indikator Imunisasi Dasar lengkap tahun 2023 adalah 100 %	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2023 adalah 95%	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Nasional tahun 2024 adalah 100 %

Dari gambaran tabel diatas, bahwa capaian kinerja di akhir masa rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 telah melampaui target indikator Provinsi Papua dan Secara Nasional.

Selain dilakukan analisis terhadap indikator kinerja pusat dan daerah, juga dilakukan analisis terhadap kesesuaian target dan realisasi atas masukan DPRD Kabupaten Jayapura yang dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :



Tabel 3.6
**Analisis Kesesuaian Target dan Realisasi Tahun 2023 berdasarkan
 Masukan DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2022**

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Menganalisis program kesehatan untuk menunjang capaian SPM kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	100 %	1 Seluruh SPM Kesehatan telah dilaksanakan tahun 2023 2 Pelaksanaan surveilans di masyarakat baik kunjungan rumah atau memperluas akses masyarakat terhadap layanan SPM melalui sarana kesehatan yang ada	1 Memperkuat ketersediaan layanan kesehatan di kampung dengan menambah sarana kesehatan Pustu serta rumah dinas petugas yang memadai 2 Memaksimalkan kerjasama/ kolaborasi kader dengan petugas kesehatan
2	Meningkatkan Angka Harapan Hidup	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	22 Puskesmas	67,78 Tahun	a. Menekan Angka Kematian Ibu b. Menekan Angka Kematian Bayi dan Balita c. Memperkuat layanan kesehatan sesuai standard bagi usia produktif d. Melaksanakan program posbindu dan poslansia	1 Dinas Kesehatan lebih intens melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi setiap kelahiran



3	Menekan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	19 Distrik	<p>AKI 202,42 /100.000 KH</p> <p>AKB 19,9/ 1000 KH</p> <p>AKABA 23,62/ 1000 KH</p>	<p>a. Melaksanakan Layanan Rumah Tunggu Kelahiran</p> <p>b. Puskesmas non rawat inap mampu layanan rawat persalinan</p> <p>c. Menyediakan pembiayaan rujukan</p> <p>d. Menjalankan Review Maternal Perinatal Menyediakan sarpras dan alat kesehatan layanan KIA</p> <p>e. Memperkuat kapasitas bidan kampung</p> <p>f. Pemenuhan bidan di sarana kesehatan kampung</p>	
4	Stunting	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</p>	19 distrik	12,5 %	<p>Melaksanakan 7 kegiatan penanggulangan Stunting baik dari sisi layanan, manajemen program serta koordinasi lintas sector dan Melaksanakan sanitasi dasar serta layanan kesehatan Ibu dan anak</p>	
5	Penguatan Imunisasi Dasar Lengkap melalui Kampung UCI	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan</p>	19 Distrik	95,8 %	<p>1 Melaksanakan Posyandu</p> <p>2 Sweeping Imunisasi pada daerah-daerah sulit dijangkau</p>	<p>1 posyandu sebagai pusat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, tersistem serta</p>

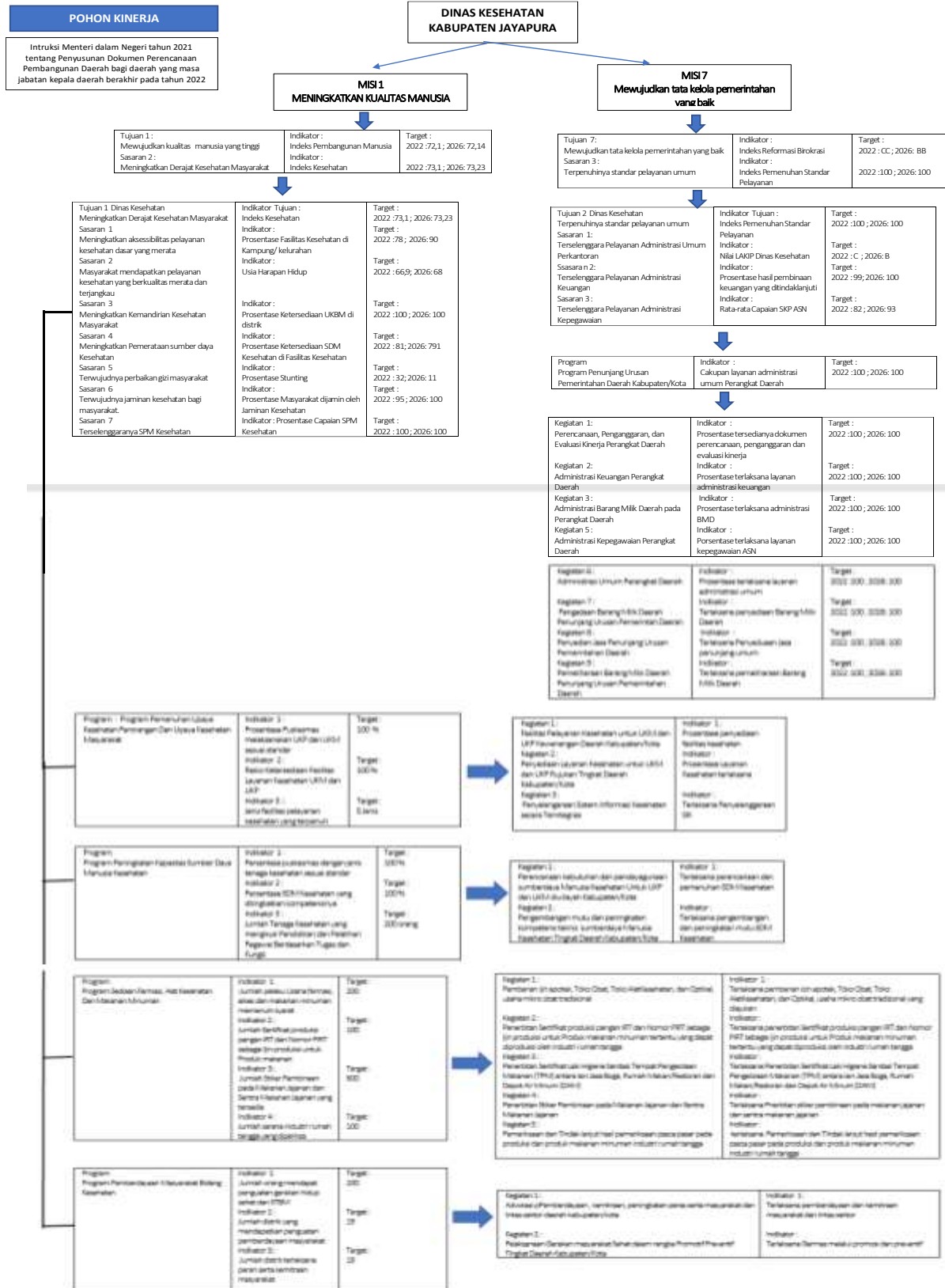


		Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota			3 Kunjungan Rumah untuk cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	kontinyu atau berkesinambungan secara periodik
6	Eliminasi Malaria	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	API 147,97/1000 Penduduk	1 Memperluas Kampung Siaga malaria 2 Pemberdayaan Kader Kampung 3 Penguatan pencegahan melalui Kelambu 4 Penguatan lintas sektor 5 Penemuan kasus dan Pelaksanaan pengobatan dengan efektif	1 Memaksimalkan kader malaria dalam tugas pelayanan 2 Melaksanakan penemuan masif dan pengobatan dengan maksimal

Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026, ditetapkan cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan dua tujuan dan 3 sasaran pembangunan sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini. Target yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja utama (IKU) adalah Indeks Kesehatan dengan target 73,5 di tahun 2023.

Gambar. 3.1
Pohon Kinerja RPD 2023-2026 Sektor Kesehatan





Dalam melaksanakan kinerja sektor kesehatan tahun 2023 ditetapkan cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana digambarkan dibawah ini, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023.

Gambar. 3.2

Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023				
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
Tujuan-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi	B										
	Sasaran 7.1.: Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan keuangan daerah		Nilai dan peringkat nasional LPPD	B	Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan keuangan daerah			Nilai dan peringkat nasional LPPD	B					
			Nilai SAKIP Daerah	B				Nilai SAKIP Daerah	B					
						S1: Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	B					
						S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan		Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	100					
						S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawain		Rata-rata Capaian SKP ASN	85					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase	100	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase	100
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
							Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi keuangan	100		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi keuangan	Persentase	100
							Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.220 Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11.220
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana administrasi BMD	100		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana administrasi BMD	Persentase	100
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasn, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasn, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksana layanan kepegawaian ASN	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksana layanan kepegawaian ASN	Persentase	100
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
							Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	5
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksana layanan administrasi umum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksana layanan administrasi umum	Persentase	100
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1



Pemerintah Kabupaten Jayapura

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
							Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1
							Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana penyediaan Barang Milik Daerah	33 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana penyediaan Barang Milik Daerah	Unit	33
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10
							Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Penyediaan Jasa penunjang umum	3 jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Penyediaan Jasa penunjang umum	Jenis	3
							Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	9
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	44
							Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	34 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	4
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	1 paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	paket	1



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11									
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	Tujuan 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
						S1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata		Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ Kelurahan	82				
						S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau		Usia Harapan Hidup	67,3 Tahun				
						S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat		Prosentase Stunting	14				
						S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat		Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	100				
Tujuan-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi	B									
	Sasaran 7.3: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	100%	Tujuan 3 Terpenuhinya standar pelayanan umum								
						S1: Terlaksananya Standard Pelayanan Minimal Kesehatan		Prosentase SPM Kesehatan	100%				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	85%			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	85%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	Prosentase	85%
			Rasio Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan UKM dan UKP	100%				Rasio Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan UKM dan UKP	100%			Rasio	100%
			Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	5				Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	5			Jenis	5
							Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan fasilitas kesehatan	100%	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan fasilitas kesehatan	Persentase	100
							Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	4 unit	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	unit	2
							Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	15 unit	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	unit	9
							Pengembangan Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	13 Set	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	PKM	10
								Jumlah Solar Cell di Pustu				Pustu	0
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1



Pemerintah Kabupaten Jayapura

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	3
							Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20
							Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	65.000 Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang	56.600
							Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis bahan habis pakai untuk fasilitas kesehatan tersedia	2 Paket	Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis bahan habis pakai untuk fasilitas kesehatan tersedia		
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	Persentase	100
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.142 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.597
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.732 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.613
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.732 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.613
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.743 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	13.011
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.329 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	20.933
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133.555 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	110.376
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.323 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6.052
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.050 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.347
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.078 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.543
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	230 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	190
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442 Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	365
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55.012 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	45.465



Pemerintah Kabupaten Jayapura

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen pengelolaan stunting	1 Dokumen		Jumlah Dokumen pengelolaan stunting	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen Kab Kota Sehat	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Kab Kota Sehat		
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1
							Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan kejawanan masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan kejawanan masyarakat	kampung	1
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
							Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (otensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah sampel yang diperiksa	1 Sampel	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (otensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah sampel yang diperiksa	Sampel	1
							Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Dokumen	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	1
							Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan			Jumlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan		
											Jumlah Petugas keamanan	50 orang	



Pemerintah Kabupaten Jayapura

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1
											Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan PMI		
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	5
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1
							Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1
							Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak	Jumlah Dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak	Jumlah Dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksana Penyelenggaraan SIK	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksana Penyelenggaraan SIK	Persentase	100
							Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	Persentase	100
							Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas	1 Dokumen	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas		1
							Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	1 Dokumen	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	
							Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1
							Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1



Pemerintah Kabupaten Jayapura

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi													
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
					S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan			Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	85%				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100				Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100				
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100				Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100				
							Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksana perencanaan dan pemenuhan SDM Kesehatan	100%	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksana perencanaan dan pemenuhan SDM Kesehatan	Persentase	100
							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	225 orang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	225
							Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1
							Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan	100%	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan	Persentase	100
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	50
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi													
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
					S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau			Usia Harapan Hidup	67,3 tahun				
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat	195			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat	195	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Jumlah Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan	50				Jumlah Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan	50				
			Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tersedia	625				Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tersedia	625				
			Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	75				Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	75				
							Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional	Terlaksana pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional yang diajarkan	100	Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional	Terlaksana pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional yang diajarkan	Persentase	100
							Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksana penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100%	Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksana penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase	100
							Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksana Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksana Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase	100
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksana Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksana Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase	100
							Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	terlaksana Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	terlaksana Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase	100
							Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minuman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minuman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi													
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
						S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat		Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah orang mendapat penguatan gerakan hidup sehat dan STBM	100			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah orang mendapat penguatan gerakan hidup sehat dan STBM	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat	19				Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat	19				
			Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	5				Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	5				
							Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Terlaksana pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dan lintas sektor	100	Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Terlaksana pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dan lintas sektor	Persentase	100
							Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1
							Pelaksanaan Gerakan masyarakat Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Germas melalui promosi dan preventif	100%	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Germas melalui promosi dan preventif	Persentase	100%
							Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1



3.2 Realisasi Anggaran

Dari laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 174.074.556.698,-** dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 68.993.620.072 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 105.080.936.721 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 72.511.798.507 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 101.562.758.286 (*Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023*). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2023 oleh karena penambahan anggaran DAK, DAU Spesifik Grant dan kebijakan Pembiayaan bantuan PBI bagi masyarakat kabupaten jayapura melalui DBH dan BHP Provinsi Papua.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 99,505,315,834 atau alokasi anggaran tahun 2023 sebesar 102,06 % dari ketetapan RPD untuk tahun 2023. Dengan realisasi keuangan belanja sebesar Rp 168.806.614.970,- atau 96,97 %; dengan rincian sebagaimana pada lampiran.

Tabel 3.8
Gambaran Alokasi Anggaran sector Kesehatan tahun 2023

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	
04.01.02	Retribusi Daerah	182.854.750
04.01.04	Lain Lain PAD yang sah	7.100.000.000
5	Belanja Daerah	
05.01	Belanja Operasi	
05.01.01	Belanja Pegawai	69.512.708.691
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	75.930.670.018
05.02	Belanja Modal	
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.581.678.084
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan bangunan	12.422.090.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.627.410.000



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa postur anggaran kesehatan sudah memenuhi syarat alokasi anggaran. Alokasi Anggaran dari DAK, DAU Spesifik Grant dan OTSUS menjadi sumber pembiayaan terbesar yang dikelola pada sector kesehatan sehingga banyak program dan kegiatan merupakan aktivitas pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Papua, sedangkan anggaran bersumber DAU/DID/DBH dan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dalam kebijakan untuk pembiayaan kegiatan inovasi daerah, manajemen pelayanan dan pembiayaan kebutuhan sarana kesehatan di kampung.

Pelaksanaan Program dan kegiatan wajib tersebut yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, diperoleh realisasi program kegiatan berupa realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja.

Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berdasarkan APBD tahun 2023 adalah:

1. Retribusi Jasa Umum berupa Jasa Pelayanan Kesehatan pada DPA induk sebesar Rp 50.000.000 dan DPA Perubahan sebesar Rp 182.854.750 dengan kenaikan 265,71 % oleh karena pelaksanaan JKN Non Kapitasi.
2. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai DPA perubahan sebesar Rp 7.100.000.000

Dari target diatas, realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2023 adalah :

1. Retribusi Jasa umum terealisasi 33.140.800 atau 18,12 %
2. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 7.481.652.706 atau 105,37 %

Belanja

Dalam pelaksanaan belanja terhadap 5 program 18 kegiatan dan 83 sub kegiatan diperoleh realisasi fisik sebesar 99,82 % dengan realisasi keuangan sebesar 96,97 %. Dalam pelaksanaan belanja tahun 2023, dibagi atas dua bagian yaitu :



- a. Operasi dengan nilai sebesar Rp 141.254.045.988 yaitu :
 - Belanja Pegawai realisasi sebesar Rp 69.495.908.691
 - Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp 71.758.137.297
- b. Modal dengan nilai Rp 28.631.178.084 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 27.552.568.982

Dalam Pelaksanaan Belanja Pelayanan Kesehatan, penganggaran UPTD Puskesmas pada pelaksanaan upaya kesehatan perorangan (UKP) melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp 7.100.000.000 dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui BOK Puskesmas sumber Dana DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp 30.694.618.000 dengan total realisasi yang dilaksanakan di 22 Puskesmas sebesar Rp 31.697.420.297, secara rinci dalam pelaksanaan BOK Puskesmas terlampir.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja beserta program dan kegiatan menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura 5 program 15 kegiatan dan 83 sub kegiatan pada tahun 2023, telah terlaksana seluruhnya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran pada sekretariat dan bidang-bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja realisasi fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 adalah 99,82% dan keuangan sebesar 96,97 %.

Pada evaluasi Kinerja terhadap indikator-indikator Kesehatan adalah :

1. Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik adalah sebanyak 19 indikator atau 54,29 %.
2. Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi adalah sebanyak 5 indikator atau 14,29 % dari total indikator.
3. Indikator yang mendapat penilaian sedang adalah sebanyak 1 indikator atau 2,86 % dari total 35 indikator.
4. Indikator yang mendapat penilaian rendah adalah sebanyak 3 indikator atau 8,57 % dari total 35 indikator.
5. Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah adalah 5 Indikator atau 14,2 % dari total 35 indikator

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indikator (12 Indikator) adalah 100 % maka terdapat dua indikator yaitu Prosentase Bayi Usia 0 - 28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standard (Cakupan KN3) dan Prosentase orang terduga TBC yang



mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dari data diatas, ditemukan bahwa 33,3 % dari indikator SPM Kesehatan telah mencapai Kinerja Tinggi sedangkan Indikator lainnya belum mencapai hasil yang memuaskan. Pencapaian terendah pada indikator Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard. Dalam penilaian nasional dengan capaian total SPM Kesehatan adalah 82,2 % maka masuk dalam predikat **Tuntas Madya**.

Dari laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp 174.074.556.698,- dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 68.993.620.072 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 105.080.936.721 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 72.511.798.507 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 101.562.758.286 (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2023 oleh karena penambahan anggaran DAK, DAU Spesifik Grant dan kebijakan Pembiayaan bantuan PBI bagi masyarakat kabupaten jayapura melalui DBH dan BHP Provinsi Papua.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 99,505,315,834 atau alokasi anggaran tahun 2023 sebesar 102,06 % dari ketetapan RPD untuk tahun 2023. Dengan realisasi keuangan belanja sebesar Rp 168.806.614.970,- atau 96,97%.

Dari capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran sasaran dan indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun kedepan.

Hal-hal yang harus lebih lagi ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian adalah:

1. Kegiatan lebih banyak di danai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK



3. Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
4. Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan.
5. Penguatan logistik Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan SPM Kesehatan.
6. Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
7. Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan
8. Pelaksanaan inovasi daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Batu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

2.2 . Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Sedangkan tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, ditetapkan struktur organisasi melalui Peraturan Daerah yaitu :

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, telah menggunakan struktur organisasi yang baru. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diperbaharui sesuai struktur yang ditetapkan.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi antara lain :

- 1.** Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang antara lain :

1. Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- ii. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - iv. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum, Program, dan Informasi

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

b) Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c) Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan

- imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di ^[1]_{sep} bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

- a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

- 1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- 2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes dan peningkatan Mutu

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

6. UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki 3 UPTD yaitu UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten, UPTD Puskesmas dan UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018.

Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain:

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD
- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan

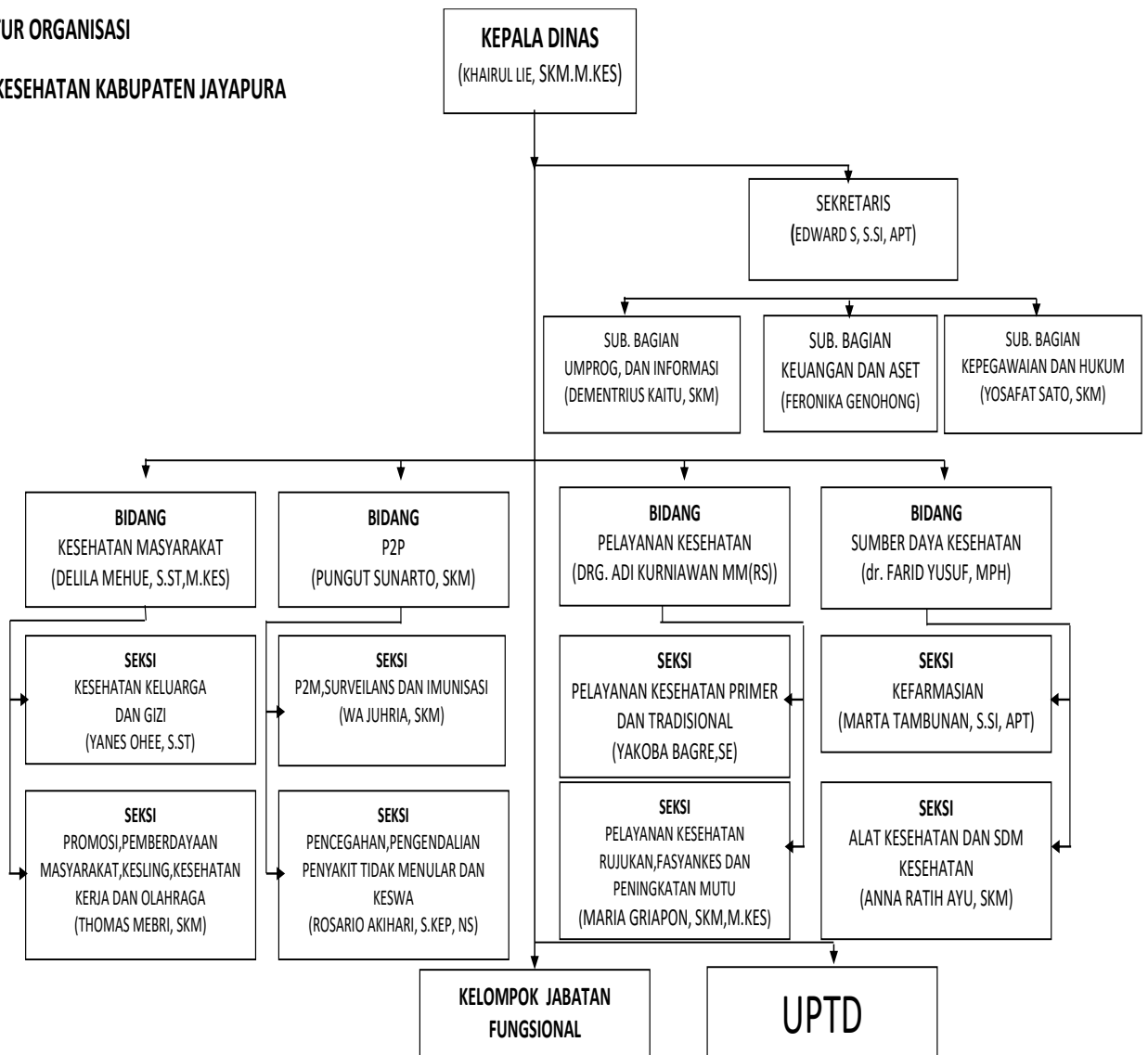
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri dari 5 orang Administrator Kesehatan dan 1 orang Jabatan Fungsional pada program gizi masyarakat dan tersebar di Bidang-Bidang

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA



Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di setiap distrik. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas memiliki jaringan pelayanan antara lain :

- a) Puskesmas Pembantu
- b) Polindes
- c) Pos Kesehatan Kampung
- d) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- e) Posbindu
- f) Poslansia

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Isu strategis Meningkatkan Kualitas manusia antara lain dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2017	Target Capaian Kinerja Tahun-					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019	2020	2021	2022		
M1. Meningkatkan kualitas manusia	T1. Meningkatkan kualitas hidup manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70.97	71.25	71.84	71.70	72.10	72.50	72.50	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
		S1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	71.13	71.36	72.05	72.25	72.75	73.15	73.15	Dinas Pendidikan, Perpustakaan
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	71.49	71.78	72.20	72.50	73.10	73.20	73.20	Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dinas Pemukiman dan Perumahan
		S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	• Pengeluaran perkapita	10,055	10,160	10,375	10,375	10,375	10,375	11,020	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi
			• Laju Inflasi	2.41	6.70	0.59	0.76	0.27*	1.02	1.02	
M2. Meningkatkan keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	T2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat adat dan perkembangan kampung adat		• Persentase Wilayah adat suku yang memiliki kejelasan peta hak ulayat	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	33.33	33.33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pertanahan dan Kawasan Pemukiman, Setda (bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat); Pemerintah Distrik
			• Indeks Desa Membangun	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah (Bidang Pmerintahan), Distrik
		S4. Meningkatnya peranan masyarakat adat dalam pembangunan daerah	Persentase Masyarakat hukum adat yang memiliki kejelasan struktur adat dan hak atas tanah	0.00	0.00	0.00	22.22	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pertanahan dan Kawasan Pemukiman, Setda (bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat); Pemerintah Distrik

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Sektor Kesehatan Memiliki Satu Tujuan yaitu meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing tenaga kerja dengan sasaran pembangunan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan 30 Indikator Kinerja selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan sehingga hasil Indikator tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang meningkat.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, reasonable, time-bound* (SMART-C).

Dalam mewujudkan sasaran RPD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna mendukung tercapainya harapan RPD antara lain :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan Kualitas Manusia yang tinggi
 Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
			S1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	78	80	82	85	87	90	90	Dinas Kesehatan
			S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	66,9	67,0	67,3	67,7	67,9	68	68	Dinas Kesehatan
			S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	81	83	85	87	89	91	91	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	32	15	14	13	12	11	11	Dinas Kesehatan
			S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	95	97	98	99	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S7 : Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Tujuan 7 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 Sasaran 3 RPD Kab Jayapura : Terpenuhinya standar pelayanan umum

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		T1: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S1. Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	C	C	B	B	B	B	B	Dinas Kesehtan

			S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	82	85	87	89	91	93	93	Dinas Kesehatan

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu

program yang dilaksanakan suatu unit kerja. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

3.3 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “SMART” yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Specific, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. 2. Measurable, yaitu dapat diukur / diquantifikasi secara obyektif. 3. Achievable, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan. 4. Relevant, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur. 5. Time-Bound, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

3.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Batu, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan. Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Terdiri dari : Indeks Fertilitas, Indeks Morbiditas dan Indeks Mortalitas	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Angka Morbiditas, Fertilitas dan data Mortalitas di masyarakat
			$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$		
		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	$\text{Indeks Capaian SPM} = \frac{\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot Mutu (20\%)} + \text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan (80\%)}}{100}$	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat	Dokumen Profil Kesehatan untuk data SPM Kesehatan

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



Khairul Lie, SKM, M.Kes

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650417 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN



Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440/ /2023
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494)

2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679)

3. Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5607)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5887)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura No. 35)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
13. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JAYAPURA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN
2023-2026**

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura Tahun 2023 - 2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENTANI

PADA TANGGAL : 25 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura,

KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650417 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440 / / TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPAEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA
PERIODE 2023-2026

1. Instansi :Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

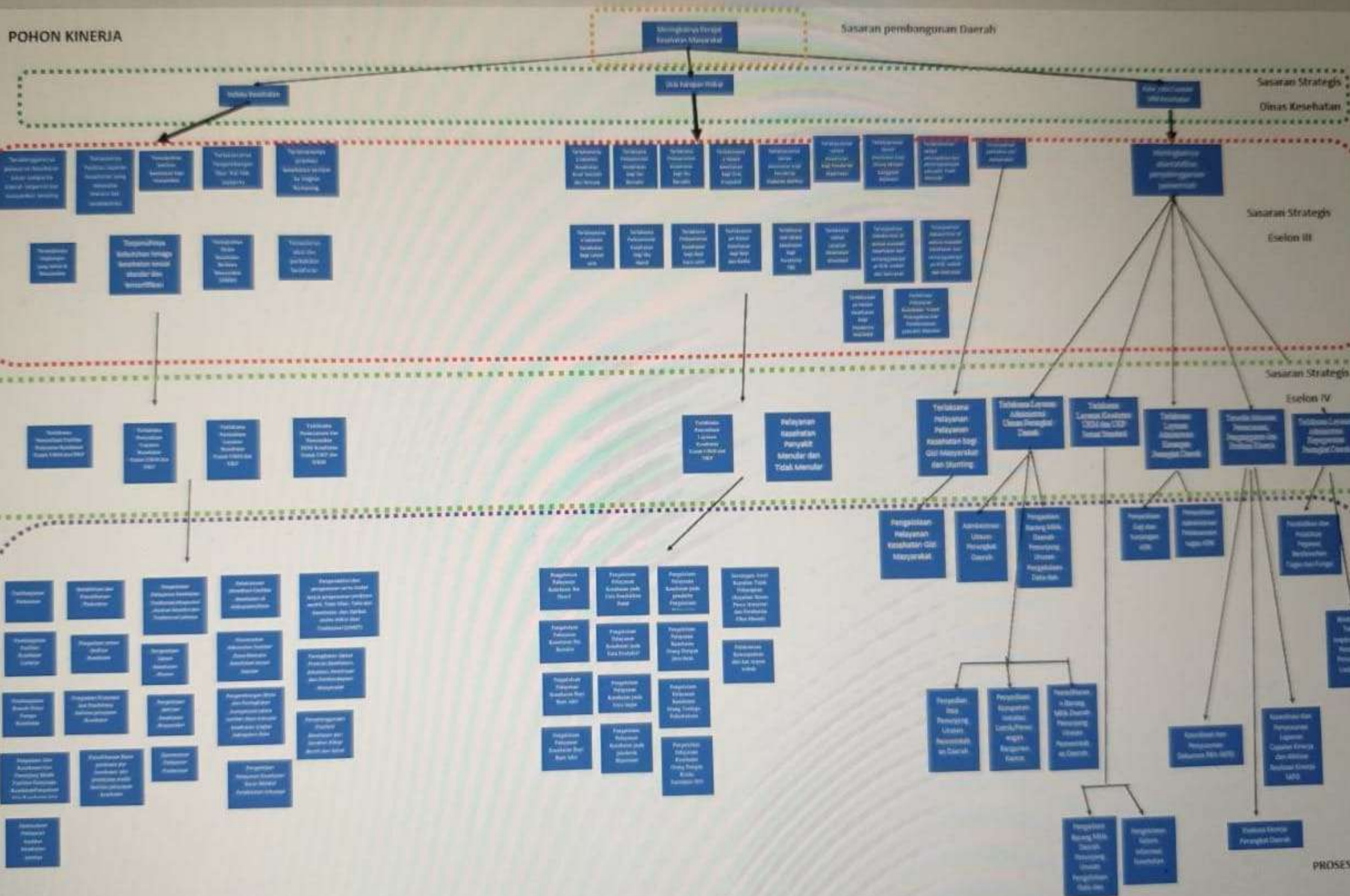
2. Indikator Kinerja Utama:

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Terdiri dari : Indeks Fertilitas, Indeks Morbiditas dan Indeks Mortalitas	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Angka Morbiditas, Fertilitas dan data Mortalitas di masyarakat
			$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$		
		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	$\text{Indeks Capaian SPM} = \frac{\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot} + \text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan}}{\text{Mutu (20\%)} + \text{layanan (80\%)}}$	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat	Dokumen Profil Kesehatan untuk data SPM Kesehatan

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura,

KHAIRUL LIE, SKM.,M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650417 199003 1 011

POHON KINERJA





DATA REALISASI S/D DESEMBER TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA



KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN KEPPERMENDAGRI 50	SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				Target Kinerja Belum Terealisasi						Lokasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Volume	Satuan	Pagu (Rp)	Kinerja			Anggaran		Kinerja (Fisik)			Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Volume	Satuan	%	Rp	%	Volume	Satuan	%	Rp	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10=7/4*100					11					12=10/6*100					13=4-7					14					15=12/4*100					16=6-10					17=15/6*100					18					19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN KEPPERMENDAGRI 50	SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				Target Kinerja Belum Terealisasi						Lokasi	Keterangan
										Pagu	Kinerja			Anggaran		Kinerja (Fisik)			Anggaran			
								Volume	Satuan	(Rp)	Volume	Satuan	%	Rp	%	Volume	Satuan	%	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4*100	11	12=10/6*100	13=4-7	14	15=12/4*100	16=6-10	17=15/6*100	18	19
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10	Kali	192.049.000	10	Kali	100,00	190.013.011	98,9	0	Kali	0,00	2.035.989	1,06	DINKES	
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	DAU	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	Unit	40.000.000	10	Unit	100,00	39.941.130	99,9	0	Unit	0,00	58.870	0,15	DINKES	
1	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BHP Prov	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	1.000.000.000	1	Unit	100,00	990.112.000	99,0	0	Unit	0,00	9.888.000	0,99	DINKES	
1	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	Unit	76.916.400	12	Unit	100,00	75.816.565	98,6	0	Unit	0,00	1.099.835	1,43	DINKES	
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	DAU	Jumlah surat berharga yang terpakai (Materai)	4	Paket	425.000	4	Paket	100,00		0,0	0	Paket	0,00	425.000	100,00	DINKES	
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	DAU	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air	12	bulan	7.080.000	12	bulan	100,00	7.080.000	100,0	0	bulan	0,00	-	0,00	DINKES	
1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	DAU	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	11	Unit	6.410.000	11	Unit	100,00	6.410.000	100,0	0	Unit	0,00	-	0,00	DINKES	
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48	Unit	121.800.000	48	Unit	100,00	82.123.250	67,4	0	Unit	0,00	39.676.750	32,58	DINKES	
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	4	Unit	33.000.000	4	Unit	100,00	33.000.000	100,0	0	Unit	0,00	-	0,00	DINKES	
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	21	Unit	15.250.000	21	Unit	100,00	7.671.000	50,3	0	Unit	0,00	7.579.000	49,70	DINKES	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP																	
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAU SG	Jumlah Puskesmas Pembantu dibangun	1	Unit	1.105.000.000	1	Unit	100,00	1.102.106.000	99,7	0	Unit	0,00	2.894.000	0,26	Kampung Malili, Kampung hulu atas	
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DAU SG/OTSUS	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang tersedia	2	Unit	8.928.780.000	2	Unit	100,00	8.463.666.782	94,8	0	Unit	0,00	465.113.218	5,21	Rumah Dinas Puskesmas Demta, Pagai, Ravenirara, Bangunan Mess Puskesmas Demta, Genyem, Kaureh, Khomba waliyauw	
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DAU SG	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambanahan Ruangan	1	Unit	150.000.000	1	Unit	100,00	149.500.000	99,7	0	Unit	0,00	500.000	0,33	Puskesmas Airu	
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAU SG/OTSUS	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	2	Unit	499.560.000	2	Unit	100,00	401.050.680	80,3	0	Unit	0,00	98.509.320	19,72	Pustu Iwon	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN KEPPERMENDAGRI 50	SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				Target Kinerja Belum Terealisasi						Lokasi	Keterangan
										Pagu	Kinerja			Anggaran		Kinerja (Fisik)			Anggaran			
								Volume	Satuan	(Rp)	Volume	Satuan	%	Rp	%	Volume	Satuan	%	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4*100	11	12=10/6*100	13=4-7	14	15=12/4*100	16=6-10	17=15/6*100	18	19
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DAU SG/OTSUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3	Unit	948.795.000	3	Unit	100,00	946.055.000	99,7	0	Unit	0,00	2.740.000	0,29	Rumah Dinas Puskesmas Kentuk, Dosay, U.Guay, Sawoy	
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	DAU SG/OTSUS/ DAK FISIK	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan sarana dan prasarana	5	Puskesmas	8.200.000.000	5	Puskesmas	100,00	7.911.237.000	96,5	0	Puskesmas	0,00	288.763.000	3,52	Pusling Roda 2 Puskesmas Kaureh, U.Guay dan Yapsi ; Instalasi Air Bersih Puskesmas Sentani & U.Guay ; Solar cell Puskesmas Yokari	
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU SG/DAK FISIK	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan	34	Set	8.312.423.000	34	Set	100,00	8.215.543.834	98,8	0	Set	0,00	96.879.166	1,17	PUSKEMAS	
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	OTSUS	Jumlah Jenis Obat dan BHP yang tersedia	110	Jenis	4.171.002.080	110	Jenis	100,00	4.092.197.729	98,1	0	Jenis	0,00	78.804.351	1,89	PUSKEMAS	
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DAU SG/OTSUS/ DAK FISIK	Jumlah fasyankes yang terdistribusinya BHP oleh IFK	20	Puskesmas	3.197.673.885	20	Puskesmas	100,00	3.134.316.620	98,0	0	Puskesmas	0,00	63.357.265	1,98	PUSKEMAS	
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAK FISIK	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30	Unit	175.000.000	30	Unit	100,00	46.615.000	26,6	0	Unit	0,00	128.385.000	73,36	PUSKEMAS	
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAU SG/DAK NF	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Paket	273.579.000	1	Paket	100,00	269.353.750	98,5	0	Paket	0,00	4.225.250	1,54	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota																	
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK NF	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4	Kegiatan	4.402.436.000	4	Kegiatan	100,00	4.402.436.000	100,0	0	Kegiatan	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DAK NF	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21	Puskesmas	1.223.045.016	21	Puskesmas	100,00	1.131.398.016	92,5	0	Puskesmas	0,00	91.647.000	7,49	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	DAK NF	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21	Puskesmas	321.200.000	21	Puskesmas	100,00	223.500.000	69,6	0	Puskesmas	0,00	97.700.000	30,42	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAU SG/DAK NF	Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21	Puskesmas	1.079.849.784	21	Puskesmas	100,00	971.807.600	90,0	0	Puskesmas	0,00	108.042.184	10,01	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAU SG/DAK NF	Jumlah Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21	Puskesmas	717.150.000	21	Puskesmas	100,00	634.450.000	88,5	0	Puskesmas	0,00	82.700.000	11,53	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK NF	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21	Puskesmas	1.550.600.000	21	Puskesmas	100,00	1.550.600.000	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	DAK NF	Jumlah pelayanan kesehatan pada lansia	21	Puskesmas	1.043.037.000	21	Puskesmas	100,00	1.035.742.000	99,3	0	Puskesmas	0,00	7.295.000	0,70	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	DAU SG/DAK NF	Jumlah Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	21	Puskesmas	200.500.000	21	Puskesmas	100,00	199.990.150	99,7	0	Puskesmas	0,00	509.850	0,25	PUSKEMAS	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN KEPPERMENDAGRI 50	SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				Target Kinerja Belum Terealisasi						Lokasi	Keterangan
										Pagu	Kinerja			Anggaran		Kinerja (Fisik)			Anggaran			
								Volume	Satuan	(Rp)	Volume	Satuan	%	Rp	%	Volume	Satuan	%	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4*100	11	12=10/6*100	13=4-7	14	15=12/4*100	16=6-10	17=15/6*100	18	19
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	DAU SG/DAK NF	Jumlah Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Militus	21	Puskesmas	378.688.800	21	Puskesmas	100,00	369.082.170	97,5	0	Puskesmas	0,00	9.606.630	2,54	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	DAU SG/DAK NF	Jumlah puskesmas melaksanakan layanan OGJ	21	Puskesmas	441.800.000	21	Puskesmas	100,00	420.858.920	95,3	0	Puskesmas	0,00	20.941.080	4,74	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DAU SG/DAK NF	Jumlah Suspek TB ditemukan dan diobati	21	Puskesmas	2.070.114.500	21	Puskesmas	100,00	1.997.668.500	96,5	0	Puskesmas	0,00	72.446.000	3,50	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	DAU SG/DAK NF	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	21	Puskesmas	1.129.591.000	21	Puskesmas	100,00	1.076.551.000	95,3	0	Puskesmas	0,00	53.040.000	4,70	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	DAK NF	Jumlah orang terdampak Krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana	21	Puskesmas	47.050.000	21	Puskesmas	100,00	47.050.000	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU/DAK NF	Jumlah Balita kurang Gizi mendapat pelayanan kesehatan	21	Puskesmas	3.214.624.459	21	Puskesmas	100,00	3.099.705.100	96,4	0	Puskesmas	0,00	114.919.359	3,57	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DAK NF	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan K3	21	Puskesmas	286.345.000	21	Puskesmas	100,00	275.621.000	96,3	0	Puskesmas	0,00	10.724.000	3,75	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	DAU/DAK NF	Jumlah sampel Sarana air Bersih, tempat pengolahan makanan yang diperiksa	21	Puskesmas	1.259.044.000	21	Puskesmas	100,00	1.258.156.000	99,9	0	Puskesmas	0,00	888.000	0,07	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK NF	Jumlah Jenis sarana Media Promkes	21	Puskesmas	150.000.000	21	Puskesmas	100,00	150.000.000	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	DAU SG	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1	Dokumen	10.900.000	1	Dokumen	100,00	10.900.000	100,0	0	Dokumen	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK NF	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans	21	Puskesmas	532.333.000	21	Puskesmas	100,00	532.333.000	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	OTSUS	Jumlah Kampung sangat terpencil/daerah sulit yang mendapat pelayanan kesehatan terpadu	21	Puskesmas	471.475.400	21	Puskesmas	100,00	471.475.400	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	Umbron dan mabuararong	
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK NF/OTSUS	Jumlah Jenis Penyakit menular yang ditangani	21	Puskesmas	1.310.131.500	21	Puskesmas	100,00	1.294.428.300	98,8	0	Puskesmas	0,00	15.703.200	1,20	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PAD/DAU SG/OTSUS	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	21	Puskesmas	14.278.066.830	21	Puskesmas	100,00	13.509.183.406	94,6	0	Puskesmas	0,00	768.883.424	5,39	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU SG	Jumlah Puskesmas Melaksanakan layanan telemedicine	3	Puskesmas	100.000.000	3	Puskesmas	100,00	100.000.000	100,0	0	Puskesmas	0,00	-	0,00	Sawoy, U.Guay & Demta	
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU SG/DAK NF	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	21	Puskesmas	4.566.928.400	21	Puskesmas	100,00	4.432.757.642	97,1	0	Puskesmas	0,00	134.170.758	2,94	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	OTSUS	Jumlah Fasyankes mendapat biaya Operasional	91	Fasyankes	1.658.551.000	91	Fasyankes	100,00	1.655.751.000	99,8	0	Fasyankes	0,00	2.800.000	0,17	Pustu & Polindes	
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DAU SG/DAK NF	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	10	Puskesmas	1.856.860.000	10	Puskesmas	100,00	1.856.859.800	100,0	0	Puskesmas	0,00	200	0,00	puskemas Yokari,ravenirara , Saduyap,airu,dan pagai	
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Kampung yang UCI	21	Puskesmas	67.930.000	21	Puskesmas	100,00	0	0,0	0	Puskesmas	0,00	67.930.000	100,00	PUSKEMAS	
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	DAK NF	Jumlah lokasi di survey epidemiologi	21	Puskesmas	382.700.000	21	Puskesmas	100,00	368.735.000	96,4	0	Puskesmas	0,00	13.965.000	3,65	PUSKEMAS	

[illegible]

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN KEPPERMENDAGRI 50		SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA				Target Kinerja Belum Terealisasi						Lokasi	Keterangan
											Pagu	Kinerja			Anggaran		Kinerja (Fisik)			Anggaran			
									Volume	Satuan	(Rp)	Volume	Satuan	%	Rp	%	Volume	Satuan	%	Rp	%		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10=7/4*100	11	12=10/6*100	13=4-7	14	15=12/4*100	16=6-10	17=15/6*100	18	19
1	02	03	3.04	01	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di kabupaten/kota		DAU SG	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	225	orang	0		orang	0,00		0,0	0	0	0,00	-	#DIV/0!	DINKES	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																		
1	02	04	2.01		Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)																		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan Apotek, Toko obat, Toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)		DAU SG	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	139.100.000	1	dokumen	100,00	139.090.000	100,0	0	dokumen	0,00	10.000	0,01	6 distrik	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		DAU SG	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT yang diterbitkan	50	Sarana	150.000.000	50	Sertifikat	100,00	148.605.000	99,1	0	Sertifikat	0,00	1.395.000	0,93	DINKES	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota																		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		DAK NF	Jumlah kegiatan Promosi, advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	361.659.906	1	dokumen	100,00	360.177.400	99,6	0	dokumen	0,00	1.482.506	0,41	PUSKEMAS	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota																		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		DAK NF	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	844.050.000	1	dokumen	100,00	806.638.000	95,6		dokumen	0,00	37.412.000	4,43	PUSKEMAS	
								TOTAL	123.152		174.074.556.793	122.927		99,82	168.806.614.970	96,97				5.267.941.823	3,03		

No	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu HamilPuskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Operasional Pelayanan Puskesmas	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	Genyem	Rp 254.850.000	Rp 9.691.000	Rp 77.300.000	Rp 14.400.000	Rp 50.400.000	Rp 25.600.000	Rp 6.400.000	Rp 37.100.000	Rp 48.000.000	Rp 206.560.000	Rp 48.100.000	Rp 6.000.000	Rp 54.470.000	Rp 273.995.468
2	Unurum Guay	Rp 54.000.000	Rp 21.600.000	Rp 75.600.000	Rp 28.800.000	Rp 62.100.000	Rp 83.700.000	Rp 40.500.000	Rp 86.400.000	Rp 32.400.000	Rp 60.240.000	Rp 27.000.000	Rp 43.200.000	Rp 55.376.000	Rp 170.000.000
3	Waibhu	Rp 35.680.000	Rp 1.918.000	Rp 44.800.000	Rp 31.200.000	Rp 24.000.000	Rp 29.985.000	Rp 4.800.000	Rp 97.800.000	Rp 16.000.000	Rp 149.680.000	Rp 34.200.000	Rp 9.600.000	Rp 43.367.000	Rp 197.612.186
4	Puskesmas Kentuk	Rp 143.400.000	Rp 35.000.000	Rp 6.400.000	Rp 21.900.000	Rp 112.000.000	Rp 115.257.000	Rp -	Rp 48.400.000	Rp 24.000.000	Rp 100.840.000	Rp 49.400.000	Rp 86.400.000	Rp 45.341.000	Rp 154.000.000
5	Sentani	Rp 419.500.000	Rp 20.507.016	Rp 79.540.000	Rp 49.800.000	Rp 72.175.000	Rp 38.400.000	Rp 16.000.000	Rp 74.800.000	Rp 89.100.000	Rp 518.760.000	Rp 48.000.000	Rp 4.200.000	Rp 63.610.000	Rp 376.950.431
6	PUSKESMAS YOKARI	Rp 345.220.000	Rp 12.240.000	Rp 32.180.000	Rp 28.000.000	Rp 82.000.000	Rp 60.000.000	Rp -	Rp 44.300.000	Rp 21.000.000	Rp 89.680.000	Rp 17.505.000	Rp 10.000.000	Rp 39.109.000	Rp 133.993.610
7	DEMTA	Rp 320.320.000	Rp 16.280.000	Rp 30.260.000	Rp 25.600.000	Rp 100.800.000	Rp 67.200.000	Rp 5.400.000	Rp 75.457.000	Rp 78.000.000	Rp 82.800.000	Rp 14.700.000	Rp 22.400.000	Rp 50.327.000	Rp 163.594.099
8	PKM YAPSI	Rp 352.200.000	Rp 24.800.000	Rp 10.750.000	Rp 16.000.000	Rp 54.400.000	Rp 64.400.000	Rp 17.100.000	Rp 35.200.000	Rp 38.200.000	Rp 94.865.600	Rp 29.700.000	Rp 42.400.000	Rp 43.345.000	Rp 208.555.395
9	PUSKESMAS DEPAFRE	Rp 140.561.000	Rp 106.800.000	Rp 24.800.000	Rp 30.350.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp 78.700.000	Rp 26.360.000	Rp 109.500.000	Rp 54.400.000	Rp 101.200.000	Rp 229.777.000	Rp -
10	Puskesmas Sawoy	Rp 238.200.000	Rp 32.100.000	Rp 54.000.000	Rp 21.600.000	Rp 54.300.000	Rp 117.400.000	Rp 9.000.000	Rp 86.400.000	Rp 10.800.000	Rp 148.798.200	Rp 17.850.000	Rp 23.400.000	Rp 48.269.600	Rp 180.000.000
11	Dosay	Rp 101.400.000	Rp 13.200.000	Rp 14.000.000	Rp 6.400.000	Rp 23.000.000	Rp 33.750.000	Rp 8.000.000	Rp 72.000.000	Rp 16.000.000	Rp 157.120.000	Rp 73.200.000	Rp 5.600.000	Rp 46.734.000	Rp 173.149.798
12	Ebungfauw	Rp 177.605.000	Rp 128.659.000	Rp 9.600.000	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000	Rp 8.000.000	Rp 138.900.000	Rp 59.000.000	Rp 64.160.000	Rp 63.000.000	Rp 34.600.000	Rp -	Rp 190.000.000
13	Saduyap	Rp 256.070.000	Rp 16.710.000	Rp 39.000.000	Rp 28.600.000	Rp 74.100.000	Rp 62.400.000	Rp 5.200.000	Rp 54.740.000	Rp 23.400.000	Rp 62.802.500	Rp 52.110.000	Rp 7.800.000	Rp 37.880.000	Rp 108.899.000
14	Kanda	Rp 102.980.000	Rp 1.622.000	Rp 114.032.000	Rp 20.400.000	Rp 111.600.000	Rp -	Rp 39.600.000	Rp 45.000.000	Rp 48.000.000	Rp 79.880.000	Rp 18.000.000	Rp 34.400.000	Rp 40.980.000	Rp 160.000.000
15	PUSKESMAS HARAPAN	Rp 178.750.000	Rp 19.111.000	Rp 24.200.000	Rp 26.100.000	Rp 42.300.000	Rp 64.800.000	Rp 22.800.000	Rp 122.850.000	Rp 108.000.000	Rp 102.025.000	Rp 25.500.000	Rp 8.100.000	Rp 52.977.000	Rp 130.055.801
16	Ravenirara	Rp 172.200.000	Rp 5.520.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 60.000.000	Rp 57.600.000	Rp -	Rp 85.830.000	Rp 32.400.000	Rp 62.480.000	Rp 27.267.000	Rp 16.800.000	Rp 39.631.000	Rp 140.000.000
17	Puskesmas Namlong	Rp 122.800.000	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 3.600.000	Rp 41.000.000	Rp 34.200.000	Rp -	Rp 59.600.000	Rp 7.200.000	Rp 84.000.000	Rp 28.800.000	Rp 32.400.000	Rp 40.829.400	Rp 204.000.000
18	Airu	Rp 298.400.000	Rp 27.280.000	Rp 15.000.000	Rp 21.000.000	Rp 30.000.000	Rp 94.200.000	Rp 9.078.000	Rp 26.000.000	Rp 40.000.000	Rp 24.000.000	Rp 36.000.000	Rp 10.000.000	Rp 36.914.000	Rp 30.000.000
19	Pagai	Rp 102.800.000	Rp 17.000.000	Rp 36.000.000	Rp 145.500.000	Rp 157.200.000		Rp 20.400.000	Rp 57.600.000		Rp 103.098.000	Rp 36.000.000		Rp 37.766.000	Rp 91.999.784
20	Nimbokrang	Rp 166.000.000	Rp 43.200.000	Rp 132.301.000	Rp 9.000.000	Rp 98.400.000	Rp 36.250.000	Rp -	Rp 51.180.000	Rp 28.800.000	Rp 137.160.000	Rp 62.450.000	Rp -	Rp 53.127.000	Rp 168.761.903
21	Lereh	Rp 416.300.000	Rp 12.000.000	Rp 16.000.000	Rp 5.400.000	Rp 34.000.000	Rp 26.200.000	Rp -	Rp 21.000.000	Rp 15.000.000	Rp 135.280.000	Rp 25.000.000	Rp 35.800.000	Rp 38.580.000	Rp 52.000.000
	Total	Rp 4.399.236.000	Rp 565.238.016	Rp 878.963.000	Rp 561.650.000	Rp 1.294.975.000	Rp 1.035.742.000	Rp 220.278.000	Rp 1.399.257.000	Rp 761.660.000	Rp 2.573.729.300	Rp 788.182.000	Rp 534.300.000	Rp 1.098.410.000	Rp 3.307.567.475

Penyelenggara n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Pelayanan promosi kesehatan	Pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, dan ASMAN	Pengelolaan surveilans kesehatan	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Kalibrasi	Total	Puskesmas
Rp -	Rp 31.600.000	Rp 14.000.000	Rp 95.600.000	Rp -	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 7.900.000	Rp -	Rp -	Rp 5.600.000	Rp -	Rp 39.800.000	Rp -	Rp 1.321.766.468	Genyem
Rp 26.600.000	Rp 54.000.000	Rp 21.600.000	Rp 37.800.000	Rp 10.800.000	Rp 40.500.000	Rp 32.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 84.282.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.148.898.000	Unurum Guay
Rp -	Rp 9.600.000	Rp 20.000.000	Rp 176.400.000	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000	Rp 9.600.000	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 969.042.186	Waibhu
Rp -	Rp 400.000	Rp 156.200.000	Rp 33.600.000	Rp -	Rp -	Rp 7.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 800.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.140.538.000	Puskesmas Kentuk
Rp 76.800.000	Rp 24.000.000	Rp 21.600.000	Rp 132.000.000	Rp -	Rp -	Rp 9.600.000	Rp 7.680.000	Rp -	Rp -	Rp 7.800.000	Rp -	Rp 47.400.000	Rp 10.296.000	Rp 2.208.518.447	Sentani
Rp -	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 69.000.000	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 5.500.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 2.400.000	Rp -	Rp 1.007.727.610	PUSKESMAS YOKARI
Rp 51.740.000	Rp 22.400.000	Rp 27.600.000	Rp 50.400.000	Rp -	Rp -	Rp 18.400.000	Rp 5.700.000	Rp -	Rp -	Rp 2.400.000	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 1.237.778.099	DEMTA
Rp 23.400.000	Rp 22.600.000	Rp 18.800.000	Rp 74.400.000	Rp -	Rp -	Rp 28.200.000	Rp 44.625.000	Rp -	Rp -	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 64.800.000	Rp -	Rp 1.313.540.995	PKM YAPSI
Rp 37.800.000	Rp 48.000.000	Rp 12.800.000	Rp 38.400.000	Rp 51.200.000	Rp 10.000.000	Rp 38.400.000	Rp 28.800.000	Rp -	Rp -	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	Rp 10.054.000	Rp 1.244.302.000	PUSKESMAS DEPAFRE
Rp -	Rp 26.550.000	Rp 11.550.000	Rp 47.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 13.980.000	Rp -	Rp 34.200.000	Rp -	Rp 48.600.000	Rp -	Rp 1.225.597.800	Puskesmas Sawoy
Rp 72.000.000	Rp 22.000.000	Rp 12.765.000	Rp 108.000.000	Rp 48.000.000	Rp -	Rp 16.000.000	Rp 32.000.000	Rp -	Rp -	Rp 31.200.000	Rp -	Rp 24.000.000	Rp 9.961.000	Rp 1.119.479.798	Dosay
Rp 32.425.000	Rp 21.600.000	Rp 20.800.000	Rp 14.100.000	Rp -	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 1.029.249.000	Ebungfauw
Rp -	Rp 19.500.000	Rp 9.750.000	Rp 90.050.000	Rp -	Rp -	Rp 3.900.000	Rp 9.240.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 974.151.500	Saduyap
Rp 3.600.000	Rp 50.400.000	Rp 74.400.000	Rp 19.800.000	Rp -	Rp -	Rp 9.600.000	Rp 4.400.000	Rp -	Rp -	Rp 20.800.000	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 10.076.000	Rp 1.014.570.000	Kanda
Rp -	Rp 73.700.000	Rp 9.900.000	Rp 86.500.000	Rp -	Rp -	Rp 6.900.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.104.568.801	PUSKESMAS HARAPAN
Rp 53.150.000	Rp 28.800.000	Rp 12.000.000	Rp 42.000.000	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 34.800.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 18.800.000	Rp -	Rp 968.478.000	Ravenirara
Rp 64.900.000	Rp 29.400.000	Rp 49.500.000	Rp 70.050.000	Rp -	Rp -	Rp 25.200.000	Rp 12.784.800	Rp 33.600.000	Rp -	Rp 6.400.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 960.464.200	Puskesmas Namlong
Rp 35.000.000	Rp 40.000.000	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 882.872.000	Airu
Rp 60.600.000	Rp 33.400.000	Rp 14.400.000		Rp 36.000.000		Rp 14.400.000								Rp 964.163.784	Pagai
	Rp 41.500.000	Rp 16.000.000	Rp 32.200.000	Rp 21.600.000	Rp -	Rp 27.600.000	Rp 14.400.000	Rp -	Rp -	Rp 90.800.000	Rp -	Rp 32.600.000	Rp 3.228.000	Rp 1.266.557.903	Nimbokrang
Rp 55.623.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 121.800.000	Rp -	Rp -	Rp 4.300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 87.220.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.113.503.000	Lereh
Rp 593.638.000	Rp 607.450.000	Rp 585.665.000	Rp 1.399.500.000	Rp 177.200.000	Rp 50.500.000	Rp 320.900.000	Rp 182.329.800	Rp 53.080.000	Rp -	Rp 428.702.000	Rp 12.800.000	Rp 338.200.000	Rp 46.615.000	Rp 24.215.767.591	

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA
CASCADING TAHUN ANGGARAN 2023**

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
Tujuan-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi	B									
	Sasaran 7.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan keuangan daerah		Nilai dan peringkat nasional LPPD	B	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan keuangan daerah			Nilai dan peringkat nasional LPPD	B				
			Nilai SAKIP Daerah	B				Nilai SAKIP Daerah	B				
							S1: Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	B				
							S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	100				
							S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	85				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase	100
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase	100
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
							Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi keuangan	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi keuangan	Persentase	100
							Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.220 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11.220
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana administrasi BMD	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana administrasi BMD	Persentase	100
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsentase terlaksana layanan kepegawaian ASN	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsentase terlaksana layanan kepegawaian ASN	Persentase	100
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
							Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	5
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi umum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksana layanan administrasi umum	Persentase	100
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1
							Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1
							Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana penyediaan Barang Milik Daerah	33 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana penyediaan Barang Milik Daerah	Unit	33
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10
							Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Penyediaan Jasa penunjang umum	3 jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Penyediaan Jasa penunjang umum	Jenis	3
							Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	9
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	44
							Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	1 paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	paket	1
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11									
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	Tujuan 1 Meningkatnya derajat kesehatan								
							S1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ Kelurahan	82				
							S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	67,3 Tahun				
							S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	14				
							S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	100				
Tujuan-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi	B									
	Sasaran 7.3: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	100%	Tujuan 3 Terpenuhinya standar pelayanan umum								
							S1: Terlaksananya Standard Pelayanan Minimal Kesehatan	Prosentase SPM Kesehatan	100%				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	85%		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	85%		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	Prosentase	85%
			Rasio Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan UKM dan UKP	100%			Rasio Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan UKM dan UKP	100%				Rasio	100%
			Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	5			Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	5				Jenis	5
							Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan fasilitas kesehatan	100%	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan fasilitas kesehatan	Persentase	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
							Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	4 unit	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	unit	2
							Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	15 unit	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	unit	9
							Pengembangan Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	13 Set	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	PKM	10
								Jumlah Solar Cell di Pustu			Jumlah Solar Cell di Pustu	Pustu	0
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	3
							Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20
							Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	65.000 Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang	56.600
							Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis bahan habis pakai untuk fasilitas kesehatan tersedia	2 Paket	Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis bahan habis pakai untuk fasilitas kesehatan tersedia		
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana	Persentase	100
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.142 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.597
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.732 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.613
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.732 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.613
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.743 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	13.011
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.329 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	20.933
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133.555 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	110.376
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	7.323 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	orang	6.052
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.050 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.347
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.078 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.543
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Jwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	230 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Jwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	190
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442 Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	365
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55.012 orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	45.465
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana Sesuai Standar	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen pengelolaan stunting	1 Dokumen		Jumlah Dokumen pengelolaan stunting	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen Kab Kota Sehat	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Kab Kota Sehat		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target 2023
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1 Dokumen	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Dokumen	1
							Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan kejawanan masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan kejawanan masyarakat	kampung	1
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
							Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah sampel yang diperiksa	1 Sampel	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah sampel yang diperiksa	Sampel	1
							Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Dokumen	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	1
							Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1
								Jumlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan			Jumlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan		
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1
											Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pili		
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di di Kabupaten/Kota	Unit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di di Kabupaten/Kota	Unit	5
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1
							Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1
							Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksana Penyelenggaraan SIK	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksana Penyelenggaraan SIK	Persentase	100
							Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan terlaksana	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan terlaksana	Persentase	100
							Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas	1 Dokumen	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas		1
								Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	1 Dokumen		Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	
							Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1
							Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1
T.1. Menunjukkan kualitas manusia yang tinggi													
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	T1: Meningkatnya derajat kesehatan								
						S4: Meningkatkan pemerataan sumber daya kesehatan		Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	85%				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA					RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN					RENCANA KERJA TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target 2023
T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi													
	S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73,2	T1: Meningkatnya derajat kesehatan								
						S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat		Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah orang mendapat penguatan gerakan hidup sehat dan STBM	100			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah orang mendapat penguatan gerakan hidup sehat dan STBM	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat	19				Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat	19				
			Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	5				Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	5				
							Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Terlaksana pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dan lintas sektor	100	Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Terlaksana pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dan lintas sektor	Persentase	100
							Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1
							Pelaksanaan Gerakan masyarakat Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Germas melalui promosi dan preventif	100%	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Germas melalui promosi dan preventif	Persentase	100%
							Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1

POHON KINERJA

Intruksi Menteri dalam Negeri tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA

Tujuan 1 : Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Indikator : Indeks Pembangunan Manusia	Target : 2022 :72,1 ; 2026: 72,14
Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indikator : Indeks Kesehatan	2022 :73,1 ; 2026: 73,23

Tujuan 1 Dinas Kesehatan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indikator Tujuan : Indeks Kesehatan	Target : 2022 :73,1 ; 2026: 73,23
Sasaran 1 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Indikator : Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	Target : 2022 :78 ; 2026: 90
Sasaran 2 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Indikator : Usia Harapan Hidup	Target : 2022 : 66,9; 2026: 68
Sasaran 3 Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Indikator : Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Sasaran 4 Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Indikator : Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Target : 2022 : 81; 2026: 791
Sasaran 5 Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Indikator : Prosentase Stunting	Target : 2022 : 32; 2026: 11
Sasaran 6 Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Indikator : Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	Target : 2022 : 95 ; 2026: 100
Sasaran 7 Terselenggaranya SPM Kesehatan	Indikator : Prosentase Capaian SPM Kesehatan	Target : 2022 : 100 ; 2026: 100

MISI 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Target : 2022 : CC ; 2026: BB
Sasaran 3 : Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indikator : Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	2022 :100 ; 2026: 100

Tujuan 2 Dinas Kesehatan Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indikator Tujuan : Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Sasaran 1: Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Indikator : Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	Target : 2022 : C ; 2026: B
Sasaran 2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Indikator : Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	Target : 2022 : 99; 2026: 100
Sasaran 3 : Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indikator : Rata-rata Capaian SKP ASN	Target : 2022 : 82 ; 2026: 93

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
--	---	-----------------------------------

Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator : Prosentase terlaksana layanan administrasi keuangan	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator : Prosentase terlaksana administrasi BMD	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 5 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator : Porsentase terlaksana layanan kepegawaian ASN	Target : 2022 :100 ; 2026: 100

Kegiatan 6 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator : Prosentase terlaksana layanan administrasi umum	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 7 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Terlaksana penyediaan Barang Milik Daerah	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 8 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator : Terlaksana Penyediaan Jasa penunjang umum	Target : 2022 :100 ; 2026: 100
Kegiatan 9 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator : Terlaksana pemeliharaan Barang Milik Daerah	Target : 2022 :100 ; 2026: 100

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1 : Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	Target : 100 %
	Indikator 2 : Rasio Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan UKM dan UKP	Target : 100 %
	Indikator 3 : Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	Target : 5 Jenis



Kegiatan 1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator 1 : Prosentase penyediaan fasilitas kesehatan
Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Prosentase Layanan Kesehatan terlaksana
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Indikator : Terlaksana Penyelenggaraan SIK

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indikator 1 : Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Target : 100 %
	Indikator 2 : Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Target : 100 %
	Indikator 3 : Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Target : 200 orang



Kegiatan 1 : Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota	Indikator 1 : Terlaksana perencanaan dan pemenuhan SDM Kesehatan
Kegiatan 2 : Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Terlaksana pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan

Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Indikator 1 :Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat	Target : 200
	Indikator 2 : Jumlah Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai ijin produksi untuk Produk makanan	Target : 100
	Indikator 3:: Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tersedia	Target : 600
	Indikator 4 : Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	Target : 100



Kegiatan 1 : Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional	Indikator 1 : Terlaksana pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional yang diajukan
Kegiatan 2 : Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Indikator : Terlaksana penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
Kegiatan 3 : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Indikator : Terlaksana Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Kegiatan 4 : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Indikator : Terlaksana Pnerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
Kegiatan 5 : Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Indikator : terlaksana Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga

Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indikator 1 :Jumlah orang mendapat penguatan gerakan hidup sehat dan STBM	Target : 200
	Indikator 2 : Jumlah distrik yang mendapatkan penguatan pemberdayaan masyarakat	Target : 19
	Indikator 3:: Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	Target : 19



Kegiatan 1 : Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Indikator 1 : Terlaksana pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dan lintas sektor
Kegiatan 2 : Pelaksanaan Gerakan masyarakat Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Terlaksana Germas melalui promosi dan preventif